



Vol. 8 No. 1, Juni 2024

# Jurnal HISTORICA

E-ISSN: 2964-9269

ISSN: 2252-4673



**Publisher:**  
**History Education Study Program**  
**University of Jember**



Vol. 8 No. 1, 2024

# Jurnal HISTORICA

E-ISSN: 2964-9269  
ISSN: 2252-4673

- |   |     |
|---|-----|
| <i>Oen Boen Ing's Role during Indonesian Independence Revolution Period on 1945-1949</i><br><i>Herdiona Hellen Herdadian, et al.</i>  | 1   |
| <i>Comparison Of Education Policies In Indonesia And Finland As Well As The Implementation Of The Concept Of Multiculturalism In Historical Learning Serta Implementasi Konsep Multikulturalisme Dalam Pembelajaran Sejarah</i><br><i>Inez Kalyana Azmi</i> | 19  |
| <i>The Use Of Chairil Anwar's " Aku" Poem In History Learning</i><br><i>Adita Pratiwi</i>   | 43  |
| <i>Mohammad Roem's Skills As A Negotiator In The Roem-Royen Negotiations</i><br><i>Rifqoti Ulya Dewi</i>  | 53  |
| <i>Moving To Become Kromo Lawi</i><br><i>Petrik Matanasi</i>  | 65  |
| <i>The Impact of Teacher Welfare on School Effectiveness</i><br><i>Diki Darmawan, et al.</i>  | 125 |
| <i>The Effect of Experiential Learning Model Integrated with Teachmint Media on Learning Motivation and Student Learning Outcomes in History Subjects</i><br><i>Sabtiya Pratiwi, et al.</i>   | 136 |
| <i>The Dynamics of Green Revolution Implementation in The Rise Farming Sector in Lamongan from 1970 to 1998</i><br><i>Afrida Nurlaily Romadhona, et al.</i>   | 158 |
| <i>The Effect of Flexiquiz Technology Integrated Problem Based Learning Model on Creative Thinking Skills and Learning Outcomes of Class X Students in History Subject</i><br><i>Pramodia Dyah Rarasandti, et al.</i>                                       | 181 |
| <i>Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia in Banyuwangi</i><br><i>Damar Wicaksono, et al.</i>  | 197 |



## Moving To Become Kromo Lawi

Petrik Matanasi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Historia.ID

Email: [pitalawa@gmail.com](mailto:pitalawa@gmail.com)

### Abstract

Mohamad Lawi Soemodihardjo, not as Kromo Lawi. Prior to being known as Kromo Lawi, he was only Mohamad Lawi Soemodihardjo. Lawi Soemodihardjo was born as the son of a manor. Lawi worked for a while at a railway company in Comal, this young man from Batang then enrolled in Koninklijk Marine (KM) or the Royal Dutch Navy. Lawi and his friends later founded the Inlandsch Marine Bond (IMB) on May 25, 1925. Because of his involvement in the PKI rebellion in Banten in 1926, Lawi was fired from the Koninklijk Marine in 1927. Then Lawi returned to Pekalongan and joined the Muhammadiyah. Lawi then joined the PNI led by Sukarno. In 1928 Lawi was entrusted to become a branch of PNI Pekalongan. When PNI dissolved, Lawi later joined in the Partindo led by Mr. Sartono. Lawi became the head of the branch of Pekalongan. In the days of the Sukarno followers, Levi was given the first name Kromo (Kr), so he was known as Kromo Lawi.

**Keywords:** Mohamad Lawi Soemodihardjo, Kromo Lawi, National Movement

### PENDAHULUAN

Batang adalah sebuah Kabupaten yang pusat keramaiannya bersebelahan dengan pusat keramaian Kabupaten Pekalongan. Selama kurun waktu era 1600an hingga 1936, Batang pernah menjadi sebuah kabupaten. Antara 1936 hingga 1965, bekas wilayah Kabupaten Batang itu menjadi bagian dari Kabupaten Pekalongan.

Batang adalah tempat kelahiran Mohamad Lawi Soemodihardjo. Bukan sebagai Kromo Lawi. Nama Kromo pada dirinya barulah didapatkannya setelah dia dewasa, setelah dia terlibat dalam perjuangan bernafaskan kerakyatan di Partai Nasional Indonesia. Sebelum dikenal sebagai Kromo Lawi, dia hanyalah Mohamad Lawi Soemodihardjo.

Kromo Lawi mengaku kelahiran tahun 1900 alias “tahun nol” di zaman Hindia Belanda. Lawi Soemodihardjo terlahir sebagai anak seorang mandor. Seingat Lawi, ayahnya adalah orang yang pendiam.

Kromo Lawi: karena Bapak saya itu seorang pendiam, jadi ya bukannya orang-orang takut karena pendiam, jadi banyak yang takut, jadi ada pengaruh diantara sesama pekerjaan itu, karena Bapak saya seorang mandor. Mandor itu pemimpin kuli, jadi seorang pemimpin kuli ya harus mempunyai wibawa diantara kuli-kuli itu.<sup>1</sup>

Ketika Hindia Belanda yang menaungi daerah Batang dan daerah lainnya berada di bawah tahta Ratu Wilhelmina. Sang Ratu, yang punya nama panjang Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau (1880-1962) itu, baru 20 tahun di “tahun nol” itu. Tiap 31 Agustus, hari ulang tahun sang Ratu, di tiap kota penting di Hindia Belanda terjadi keramaian.

Sekolah adalah jalan keluar menuju kehidupan mapan bagi banyak orang Indonesia sejak abad lalu. Sekolah bisa membuat orang jauh dari kerja kasar yang tidak diinginkan banyak orang Indonesia. Bahkan bukan ilmu pengetahuan yang perlu dikejar dari sebuah sekolah, asal bisa baca tulis berhitung dan juga ijazahnya adalah yang terpenting.

Posisi ayahnya yang mandor di Handel Spaak itu memungkinkannya bersekolah. Sebuah kemewahan bagi banyak orang Indonesia dewasa itu. Di zaman Hindia Belanda, bisa bersekolah hingga taraf Sekolah Dasar (SD) saja sudah merupakan hal yang luar biasa baiknya. Ijazah SD sudah bisa dipakai untuk melamar tentara untuk pangkat sersan atau sekedar menjadi juru tulis di kantor pemerintah atau swasta.

Kromo Lawi: Jadi waktu itu saya masih mengikuti pelajaran di sekolah Marine Makasar, pelajaran itu biasanya adalah 2 tahun sampai 3 tahun, tapi karena saya dulu itu adalah orang keluaran HIS dan terus ke *Tweede School*, jadi pendidikan bahasa Belanda saya sudah lebih matang dari pada orang tidak sekolah di HIS, sebab dulu sekolah Bumiputera itu ada 2: ada HIS ada *Tweede Inlanders School*.<sup>2</sup>

Pengakuan itu dibuat ketika Kromo Lawi sudah sepuh, berusia lewat dari 70 tahun. Mengingat apa yang terjadi setengah abad sebelumnya pada usia itu jelas sangat sulit. Tak heran jika ada detail-detail nama tempat atau lembaga yang kurang tepat dalam pengakuan Kromo Lawi itu.

HIS adalah singkatan dari *Hollandsch-Inlandsche School*. Sekolah dasar tujuh tahun berbahasa Belanda yang diperuntukan untuk anak-anak bumiputra. Sementara yang dimaksud Kromo Lawi sebagai *Tweede Inlanders School* adalah *Tweede Inlandsche School* yang biasa disebut *Sekolah Ongko Loro* atau Sekolah Kelas Dua. Lama belajar di sekolah ini tidak lebih dari lima tahun.

---

<sup>1</sup> Wawancara Anton E. Lucas dengan Kromo Lawi di Pekalongan, 11 Juni 1973.

<sup>2</sup> Wawancara Anton E. Lucas dengan Kromo Lawi di Pekalongan, 9 Juni 1973.

HIS baru dimulai pemerintah kolonial sejak 1914, sebagai penerus dari Sekolah Kelas Satu.<sup>3</sup> Sebelum HIS sekolah dasar berbahasa Belanda tujuh tahun yang ada ialah *Europe Lager School* (ELS) yang diperuntukan anak-anak Eropa dan segelintir Tionghoa dan bumiputra.

Diantara siswa yang lulus atau pernah bersekolah di *Sekolah Ongko Loro* ini ada yang boleh melanjutkan ke HIS. Lawi adalah siswa yang mula-mula belajar *Sekolah Ongko Loro* di Purworejo ketika HIS belum ada lalu lanjut ke kelas-kelas atas di HIS Pekalongan. Hingga akhirnya dia punya ijazah HIS.

HIS bukan satu-satunya pendidikan penting yang dialami Lawi muda. Dia pernah belajar pula di pesantren.<sup>4</sup> Selain itu dia pernah pula belajar di sebuah Sekolah Kehutanan yang berada di Sukabumi. Kemudian dia sempat bekerja di perusahaan kereta api Semarang Cheribon Stoomtram Maatschappij (SCS) dan ditempatkan di Batang dan Comal.<sup>5</sup> Sebelum akhirnya dia masuk Koninklijk Marine (KM) alias Angkatan Laut Kerajaan Belanda.

Buruh kereta api adalah kelompok radikal yang berani berseberangan dengan pemerintah kolonial. Apalagi setelah kedatangan Henk Sneevliet ke Hindia Belanda. Para buruh kereta api berhimpun dalam serikat buruh kereta api alias *Vereniging van Spoor-en Tramwegpersoneel* (VSTP). Anggota muda sohor dari VSTP yang jadi murid Sneevliet adalah Semaoen (1899-1971), yang kemudian menjadi salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia (PKI) dan lama terusir dari Hindia Belanda.

Bekerja di perusahaan kereta api yang bersinggungan dengan VSTP tentu berpotensi membuat Lawi muda “kerasukan” setan bernama sikap kritis kepada pemerintah kolonial. Namun, pengaruh buruh itu tidak berlangsung lama bagi Lawi muda karena dia hanya sebentar di perusahaan itu.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode sejarah. Mulai dari mengumpulkan bahan-bahan sumber, memverifikasi sumber-sumber yang ada, menafsirkan dan menganalisa sebagai sebagai sebuah narasi baru yang kemudian dituliskan dalam tulisan ini.

Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, surat kabar lama, arsip, dan bunga rampai. Sumber lainnya adalah wawancara yang memperkaya sumber-sumber penulisan tulisan ini.

### 1. Angkatan Laut Yang Keras!

Dulu Angkatan Laut Kerajaan Belanda alias *Koninklijk Marine* itu memang membuka kesempatan bagi orang Indonesia untuk bekerja di dalamnya. Ada masa

<sup>3</sup> Marwati Djoened Poesponegoro dkk, *Sejarah nasional Indonesia: Zaman Kebangkitan Nasional dan masa Republik Indonesia, +1900-1942*, Jakarta, Balai Pustaka, 2008, hlm. 127.

<sup>4</sup> Wawancara Dharmono Konstituanto Yoga bin Kr. Lawi Soemodihardjo, Pekalongan, 20 Januari 2023.

<sup>5</sup> Anton Lucas, *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1989, hlm. 328

mereka pernah memasang iklan bertuliskan: *Saja Orang Marine toeroetlah saja!* Apalagi di masa awal-awal Perang Dunia II.

Angkatan Laut Kerajaan tidak hanya memberi kesempatan untuk menjadi kelasi dek atau *stoker* juru api di kamar mesin. *Regeling van het Korps Inlandsche Schepelingen bij de Koninklijke Marine in Nederlandsch Indie* (1937) menyebut posisi yang tersedia untuk orang Indonesia antara lain: *Bootslieden* (pelaut dek), *Torpedomaker* (ahli torpedo), *Machinist* (masinis), *Timmerman* (tukang kayu), *Monteur* (montir), *Vliegtuigmaker* (teknisi pesawat), *Bottellier* (pergudangan), *Ziekenverpleger* (perawat), *Schrijver* (juru tulis), Muzikant (pemusik) *Kwartiermeesters Stokers* (kopral stoker senior).<sup>6</sup> Sebelum 1940, sulit menemukan orang Indonesia dalam posisi perwira dalam Angkatan Laut Kerajaan.

### Dari KIS Ke Matros.

Bersekolah di HIS membuat Lawi muda bisa menguasai bahasa Belanda. Ijazah SD macam HIS (yang dibarengi kemampuan berbahasa Belanda) cukup laku untuk mendaftar masuk *Kweekschool voor Inlandsche Schepelingen* (KIS) alias sekolah pendidikan pelayaran bumiputra di Makassar. Lawi muda mengaku pada tahun 1918 sudah belajar di sekolah itu.

KIS Makassar adalah sekolah yang mencetak pelaut untuk Angkatan Laut Kerajaan Belanda. Di Surabaya, sekolah angkatan laut ada, namun untuk melatih teknisi bagian mesin, yang jika lulus menjadi *stoker* alias juru api. KIS menerima lulusan HIS, ELS, juga Schakelschool dengan usia minimum 16 tahun.

Seorang pemuda bumiputra akan dikontrak selama enam tahun di KM. Sebanyak 75 pelaut akan dilatih di KIS Makassar. Kala itu diharapkan kekuatan personil bumi putra harus mencapai 1.615 orang dan setiap tahunnya 165 orang harus dilatih.<sup>7</sup>

Di tahun 1913, jumlah orang Indonesia di KM ada 1.257 orang, di tahun 1924, jumlahnya meningkat jadi 2.402 orang.<sup>8</sup> Jumlah orang Indonesia di KM, pada zaman kolonial hanya dalam kisaran ribuan saja. Tidak sebanyak yang jadi serdadu KNIL. Pada 1930an, terdapat 2.400 orang Indonesia di KM dan ada 4.800 pelaut Indonesia di KPM.<sup>9</sup>

Mulanya kebanyakan yang belajar di KIS Makassar adalah orang-orang Ambon dan Minahasa, yang lebih terbiasa dengan baca tulis dan berbahasa Belanda, serta beragama Kristen. Lawi muda termasuk sedikit orang Jawa dan Islam di dalamnya.

Pemerintah kolonial sendiri juga berharap orang-orang Jawa, yang paling banyak pendudukanya di Hindia Belanda, juga masuk KIS dan bergabung dalam

---

<sup>6</sup> Sudono Jusuf, *Sedjarah Perkembangan Angkatan Laut*, Jakarta, Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sedjarah ABRI, 1971, hlm. 7.

<sup>7</sup> *Opleiding Inlandsche Schapelingen*, Bataviaasch Nieuwsblad (15/05/1914): *Opleiding Inlanders tot Oorlogsmatros*, Algemeen Handelsblad (15/05/1914).

<sup>8</sup> Berdasarkan *Rapport Koninklijk Marine in Nederlandsch Indie 1925*, yang dirilis Koninklijk Marine pada 1925 (Sudono Jusuf, *Sedjarah Perkembangan Angkatan Laut*, Jakarta, Departemen Pertahanan Keamanan, 1971, hlm.6.)

<sup>9</sup> *Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Periode Perang Kemerdekaan 1945-1950*, Jakarta, Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, 2012, hlm. 25.

Angkatan Laut. Ketika Lawi belajar di sana, ada sesama siswa KIS Makassar yang kemudian menonjol. Namanya Jacob Johannes yang katanya berasal dari Ambon, yang pada 1928 menjadi buah bibir di Pandji Poestaka.

Sekarang mulai ada juru terbang (*vliegenier*) bumiputra. Adapun yang mendapat kehormatan memperoleh nama *vliegenier* itu yang pertamanya ialah tuan Jacob Johannes, Inlandsch Sergeant Schrijver (Sersan Juru Tulis Bumiputra). Sekarang bumiputra tidak saja turut terbang, tetapi telah turut memegang setir (*stuur*) di udara.<sup>10</sup>

Siswa-siswa KIS tinggal dalam sebuah asrama. Mereka tidak perlu pusing dengan pakaian dan makanan, karena itu diusahakan pemerintah kolonial. Mereka dapat 20 sampai 45 sen sehari. Mereka berusia sekitar 16 hingga 21 tahun. Mereka tidak izinkan menikah selama sekolah.

Mulanya KIS hanya punya 77 orang murid saja. Di tahun pertama KIS mendapat siswa lulusan Inlandsch Tweede Klasse School (Sekolah Bumiputras Kelas Dua), namun mereka diwajibkan belajar bahasa Belanda di sana. Selain belajar aba-aba, olahraga, merawat dan memakai senapan, latihan ala pasukan infanteri (jalan kaki), sinyal, dayung, berlayar, tali-temali, simpul-simpul, dan penggunaan kompas.

Setelah teori di darat mereka akan dilatih di kapal. Sejak 1917, ada tempat latihan renang. Mereka dilatih setidaknya satu setengah tahun. Enam bulan terakhir pelatihan, seorang *Lichtmatroos* (kelasi baru) dinaikan pangkat menjadi Kelasi Kelas Tiga (*Matroos der 3e klasse*), mereka lalu diperbantukan di atas kapal HrMs Mataram sebelum ditempatkan di armada.<sup>11</sup>

Lawi mengaku dia cocok di sekolah Angkatan Laut. itu dan setidaknya tidak menjadi yang terbawah diantara para siswa.

Jadi di sana saya sebagai orang yang menonjol, siswa yang lebih menonjol, karena bahasa Belanda saya adalah lebih baik dari pada anak-anak Marine yang ada itu, anak-anak Marine yang ada itu ya artinya hanya bicara atas dasar karena pergaulan, kalau saya itu dari pendidikan, maka di Marine itu sampai-sampai saya ini adalah di cintai sekali oleh para opsir, para opsir Marine. Karena saya dicintai oleh para opsir Marine itu sampai orang tua saya itu setiap bulan mesti dibantu oleh opsir dengan dikirim uang, jadi uang saku saya tetap untuk saya, tapi opsir Marine itu memberikan bantuan mengirim orang tua saya poswesel, walaupun tidak banyak, karena pengirimannya antara hanya Rp 5,-, waktu itu. Tapi Rp 5,- itu banyak, Rp 5,- untuk zaman belanda itu adalah banyak sekali.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> *Djoeroe Terbang Boemipoetera Jang Pertama*, Pandji Poestaka nomor (24/01/1928); *Djoeroe Terbang Boemipoetera Jang Pertama*, De Militair (04/02/1928).

<sup>11</sup> J.P. Nieborg, *Indie en de zee: de opleiding tot zeeman in Nederlands-Indie 1743-1962*, Amsterdam, De Bataafsche, 1989, hlm.76-78.

<sup>12</sup> Wawancara Anton E. Lucas dengan Kromo Lawi di Pekalongan, 9 Juni 1973.

Lawi Soemodihardjo muda mengaku dia bisa bermain sepakbola dan dia termasuk *Voetbaler* (pemain sepakbola) dan Atlit olahragawan. Kemampuan olahraga itu membuatnya populer di kalangan perwira. Seperti di masa kini, olahraga adalah bagian dari kegiatan militer di masa damai.

Tentu saja ada perbedaan antara anggota rendahan Angkatan Laut (KM) dengan anggota tentara kolonial *Koninklijk Nederlansche Indische Leger* (KNIL) di Hindia Belanda. Anggota Angkatan Laut lebih tercerahkan dibandingkan anggota Angkatan Darat kolonial. Kelasi Angkatan Laut Belanda sama berpendidikannya dengan seorang sersan KNIL. Sementara itu prajurit rendahan KNIL kebanyakan buta huruf seperti *bediende* alias babu di Angkatan Laut Belanda.

Anak militer yang bukan *bediende*, sesudah diterima buat aspirant opleiding KIS harus *tekeen* (tandatangan) dinas enam tahun dan menerima *handgeld* (uang kepala) 200 Gulden—diberi pertama kali 125 Gulden dan yang 75 Gulden diberi diberi tempo verlof (liburan). Akan tetapi menilik keadaan buat Korps Inlandsche Bediende terbalik belaka. Buat Inlandsche Badiende tak boleh *tekeen* 6 tahun. Dikabulkan hanya *tekeen* satu tahun saja, dengan menerima uang juga sejumlah 24 Gulden.<sup>13</sup>

Kehidupan *Bediende* tidak lebih baik daripada seorang serdadu KNIL. Dibandingkan kelasi rendahan anggota Angkatan Laut, *bediende* di Angkatan Laut jauh lebih malang lagi. Korps *bediende* sejatinya ada di Angkatan Lautm namun tidaklah diperlakukan layaknya anggota Angkatan Laut yang lain.

Di KNIL banyak serdadu yang tidak pernah sekolah dasar sema sekali ketika mendaftar.<sup>14</sup> Meski pangkat Lawi muda tergolong rendah di Angkatan Laut Belanda, namun dia lebih baik posisinya daripada para koprал di KNIL dan dia sendiri secara kecerdasan setidaknya seperti seorang sersan KNIL.

Makassar punya tempat penting bagi orang Jawa yang melawan pemerintah kolonial. Itu adalah makam dari Pangeran Diponegoro sang Panglima Perang Jawa. Letaknya tidak jauh dari Pelabuhan Makassar. Sosok Pangeran Diponegoro tentu mampu membentuk kesadaran bagi sebagian Orang Jawa bahwa Belanda harus dilawan, termasuk dengan cara yang halus sekali pun.

Masa-masa mudanya dii Angkatan Laut, Lawi muda sudah belajar politik. Setidaknya dia belajar berorganisasi di kalangan kelasi Angkatan Laut. Selain itu dia memperluas jaringan perkawannya.

Saya mempunyai kebebasan lebih banyak untuk apa namanya, membaca tentang bagaimana Pemilihan Marine, bagaimana keadaan dengan suara itu saya mempunyai kebebasan hingga saya disana

<sup>13</sup> Jawablah Ini!, Sinar Laoetan (nomor 6, September 1929)

<sup>14</sup> Soeharto & Ramadhan KH, Soeharto: Pikiran Ucapan dan Tindakan Saya, Jakarta, Citra Lamtorogung, 1991, hlm. 19.

banyak kenal dengan orang-prang yang dari sekolah Pamong Praja, sebab di Makassar ada sekolah Pamong Prajaan.<sup>15</sup>

Selama di Makassar itu, Lawi muda bergaul dengan banyak kalangan. Diantaranya siswa sekolah pamongpraja Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA) Makassar. Dimana banyak anak bangsawan bahkan raja bersekolah di sana. Belakangan OSVIA menjadi Middelbare Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren (MOSVIA). Jika sebelumnya menerima lulusan HIS atau ELS maka MOSVIA menerima lulusan SMP Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) untuk bisa jadi siswa.

Sisa gerbang sekolah Lawi muda di Makassar itu masih ada. Namun, dewasa ini bukan angkatan laut yang bermarkas di sana. Di zaman revolusi kemerdekaan, bekas sekolah Lawi muda itu dikenal sebagai Kampement KIS. Tempat tentara Belanda bertangsi. Kini sebuah satuan pendukung Angkatan Darat yang bekerja di tempat itu.

Setelah lulus dari sekolah itu, Lawi muda berdinasi di Angkatan Laut dengan pangkat awal Kelasi Kelas Tiga. Dia tak hanya sibuk bekerja, tapi di sini Lawi muda juga terpengaruh oleh sikap kritis anggota Angkatan Laut.

### **Kelasi Pribumi Berkongsi**

Angkatan Laut Kerajaan Belanda di masa lalu sangatlah takut kepada Sarekat Islam (SI). Sebelum Lawi muda lulus dari KIS, pihak Angkatan Laut Kerajaan melakukan sebuah pemeriksaan kepada para anggota-anggotanya.

Het Vrije Woord: Pada tanggal 18 Februari, semua bumiputra di kapal dan lembaga dari Angkatan Laut diperintahkan untuk membongkar kotak ransel mereka. Penyebab perintah kemungkinan besar ingin mencari tahu, karena takut ada anggota SI yang tersembunyi di antara orang Jawa. Kenapa berpikir seperti itu? Beberapa Bumiputra ditanya apakah mereka anggota SI.<sup>16</sup>

Kala itu, para anggota dari perkumpulan anggota Angkatan Laut Bumiputra alias *Bond van Inlandsche Marine Personeel* bertemu di Gedung Sarikat Islam bernama Tamang Tamalian. Menurut Het Vrije Woord mereka tidak ada kaitannya dengan Sarekat Islam, seperti yang ditakutkan Angkatan Laut Kerajaan Belanda.

Diantara anggota Angkatan Laut Kerajaan yang pribumi, pernah ada organisasi Sinar Laoetan, namun organisasi ini sudah dibubarkan. Sekitar 1917, kaum sosialis Hindia Belanda sudah menggandeng buruh dan anggota Angkatan Laut.

Mas Arga: Begitulah dari perhimpunan Sinar Laoetan, yaitu perhimpunan matros-matros (kelasi-kelasi) bumiputra dalam Marine sudah mulai seperti kapal ditengah lautan kena gelombang. Begitulah

<sup>15</sup> Wawancara Anton E. Lucas dengan Kromo Lawi di Pekalongan, 9 Juni 1973.

<sup>16</sup> Vrees Voor de SI Bij de Koninklijke Marine, Het Vrije Woord (17/03/1917).

perhimpunan Sinar Laoetan, belum tentu berdiri terus, tetapi banyak opsir-opsir (perwira-perwira) yang cemburuan!! Tentu penulis pikir, kalau anak buahnya maju, yang dipertuan tidak suka. Sedang surat kabar Het Anker, yaitu organisasinya Bond voor Mindere Marine Personeel dilarang dan tidak boleh dibaca oleh anak buahnya kapal perang di Hindia dan di Belanda, tetapi siapa? Belandakah? Jawakah? Maka dalam Marine ada dua bangsa yaitu Jawa dan Belanda, tetapi yang mengasih order (perintah) tidak terang, juga di dalam Algemeene Baksorder tida disebut apa-apa.<sup>17</sup>

Pada 1917 itu di Surabaya telah didirikan Dewan Matros dan Marine. Partai Komunis Indonesia (PKI) menyebut: Untuk pertama kali kaum matros dan marine bersama memelopori Hari Buruh Sedunia pada 1 Mei tahun 1918.<sup>18</sup>

Di Angkatan Laut terdapat seorang kelasi kritis yang dikenal sebagai Mas Arga. bernama Mas Argawidjaja alias Margawidjaja alias Mas Arga. Pendidikannya hanya sekolah dasar saja, itu pun tanda ijazah, pada 1910.<sup>19</sup> Meski begitu dia punya pikiran dan tulisan yang tajam kepada pemerintah kolonial. Dia mengkritisi sikap otoritas yang tidak menghargai orang Jawa.

Mas Arga: Hm!! Kalau begitu selamanya dalam Marine masih tetap, tentu dan lebih baik pembesar Marine tidak usah mengambil lagi bangsa Jawa buat keperluannya militer! Begitu juga dari hal penghinaan, tidak saja di dalam luar dinas militer, di dalam Marine lebih-lebih kepada bangsa Jawa, tetapi kita tidak merasa salah, melainkan “takut karena salah dan berani karena benar.”

Mas Arga tentu saja tidak lama. Dia kemudian terjun ke dunia jurnalistik. Dia mulai sebagai korektor dan kemudian dia pernah duduk dalam Dewan Redaksi *Pertja Selatan*.<sup>20</sup> Mas Arga, di tahun ramainya SI Afdeling B pada 1919, pernah berada di Serang dan jadi editor dari *Mimbar*. Di sana dia menjadi pendukung dari pemimpin Sarekat Islam Banten, Hasan Djajadiningrat.<sup>21</sup>

Organisasi Sinar Laoetan barangkali tidak lama umurnya, namun tidak semua kelasi Angkatan Laut Bumiputra melupakannya. Belakangan, sebuah surat kabar bernama Sinar Laoetan lalu muncul. Dengan salah satu pengurusnya bernama Martin Marseha Paradja. Sinar Laoetan sebagai media pekerja bawahan Angkatan Laut cukup peduli dengan nasib Korps Bediende atau Babu Laut militer itu.<sup>22</sup>

Kala itu, di kalangan buruh pelabuhan dan pelayaran, terdapat organisasi Serikat Pegawai Pelaboehan dan Laoetan (SPPL) yang dipimpin HB Sedeng. Organisasi yang punya surat kabar bernama *Djangkar* ini, dibentuk antara 19-21

<sup>17</sup> Marine di Hindia Belanda, *Oetoesan Hindia* (29/05/1916)

<sup>18</sup> 40 Tahun PKI, 1960, hlm. 12.

<sup>19</sup> Basilius Triharyanto, *Pers Perlawanan, Politik Wacana Antikolonialisme Pertja Selatan*, Yogyakarta, LKiS, 2009, hlm.IX.

<sup>20</sup> Basilius Triharyanto, op. cit., hlm. IX.

<sup>21</sup> *Sinar Merdeka*, De Preangerbode (31/08/1919)

<sup>22</sup> Jawablah Ini! Sinar Laoetan (nomor 6, September 1929)

Desember 1924.<sup>23</sup>

Lawi muda sendiri kemudian aktif menjalin perkawanan dengan banyak anggota Angkatan Laut Belanda. Terutama dari golongan pribumi, yang nasibnya dalam kedinasan tidaklah jauh dengan dirinya. Lawi muda tidak hanya berkawan dengan orang Jawa saja, tapi juga dengan anggota dari Minahasa, Ambon dan lainnya.

Ha di situ tahun 1924 itu kita mulai membicarakan bagaimana kita, hanya membicarakan soal bagaimana kita. Pembicaraan itu berjalan sampai hampir kira-kira 7 bulan, sebab kita memulai dengan gagasan inspirasi yang ada, yaitu tahun 1924 antara bulan September-Oktober, tapi kemudian pada bulan Mei 1925 barulah kita lantas berkumpul. Kita kumpulkan antaranya dari Manado, dari Ambon, dari Timor, dari Jawa, dari Sumatra, itu kita kumpulkan. Kurang lebih antaranya 25 Inlander Schepeling (pelaut Hindia).<sup>24</sup>

Mereka merasa ada perbedaan nasib antara mereka dengan pelaut Belanda di Angkatan Laut. Gambaran umum kala itu, pelaut Belanda mendapat kelebihan lebih banyak daripada yang bumiputra.

Kromo Lawi: Akibat perbedaan nasib yang sangat menyolok antara dua jenis asal keturunan (Europeaan dan Inlanders) di kalangan anak Marine di Koninklijk Marine di Hindia Belanda, gagasan untuk perbaikan nasib bagi anak Marine pribumi (Inlanders) diwujudkan dengan dibentuknya persatuan persatuan Anak marine pribumi dengan nama Inlandsche Marine Bond.<sup>25</sup>

Jadi, masalah kesejahteraan anggota pelaut militer di Angkatan Laut Kerajaan Belanda sudah menjadi perhatian kala itu. Satu dekade sebelum Pemberontakan Zeven Provinciën pada Februari 1933 yang memprotes penurunan gaji kelasi Angkatan Laut Kerajaan Belanda.<sup>26</sup>

Pertemuan pendirian Inlandsche Marine Bond (IMB) ini terjadi pada 25 Mei 1925 di rumah Lawi Soemodihardjo di Jagalan 41 Surabaya. Dengan dihadiri 25 anggota Angkatan Laut Bumiputra, yang terdiri dari 10 orang Jawa, 5 orang Minahasa dan Sangir, 5 dari Ambon, 3 dari Timor dan 2 dari Sumatra. Lima orang yang dianggap pendiri adalah: Bakri dari Pasundan, Supardi dari Madura, Suparman dari Jawa Timur, Sumaryono dari Jawa Tengah dan Lawi Soemodihardjo sendiri. Sebuah pengurus terbentuk dalam rapat itu. Ketua: J. Walandauw dari Manado, Wakil Ketua: Bakri dari Pasundan, Sekretaris Lawi Soemodihardjo dari Jawa Tengah, Bendahara: Supardi dari Madura, Pembantu:

<sup>23</sup> Serikat Pegawai Pelaboehan dan Laoetan, Djangkar (01/01/1925)

<sup>24</sup> Wawancara Anton E. Lucas dengan Kromo Lawi di Pekalongan, 9 Juni 1973.

<sup>25</sup> Riwayat Singkat Inl. Marine Bond (IMB) menurut Kromo Lawi, Pekalongan 20 Mei 1973. (Arsip Koleksi Anton Lucas).

<sup>26</sup> *Citra dan perjuangan perintis kemerdekaan: Seri pemberontakan di atas Kapal Hr. Ms. De zeven Provinciën*, Jakarta, Direktorat Jenderal bantuan Sosial, 1980, hlm. 31.

Suparman dari Jawa Timur, Sumarjono dari Yogya dan dari Aritonang dari Tanah Batak.<sup>27</sup>

Begitulah Inlandsche Marine Bond (IMB) alias organisasi Angkatan Laut bumiputra lahir. Jadi, setelah Sinar Laoetan bubar, pada 1925, IMB muncul. Anggotanya sekitar 110 orang. Untuk orang bumiputra yang beragama Kristen, ada organisasi pelautnya di Marine, yakni: Inlandsche Christelijke Marine Bond (ICMB).<sup>28</sup>

Anggota Marine Bumiputra diharuskan menjadi IMB dengan membayar kontribusi. Mereka dilarang untuk menjadi anggota Partai Politik.<sup>29</sup> Ini wajar di masa itu, karena mereka adalah alat negara yang diharuskan tunduk kepada Kerajaan Belanda saja.

Raden Sakoentala bin Ronohastro: pada suatu saat seseorang yang juga bergerak dalam perjuangan kemerdekaan, meminta saya agar mau masuk Angkatan Laut Belanda (Marine) dengan perhitungan bahwa di lingkungan Angkatan Laut itu belum ada yang berkecimpung dalam politik.<sup>30</sup>

Sakoentala bin Ronohastro yang bergabung setelah 1925 di Angkatan Laut dan ikut IMB itu, belakangan juga dipecat dari Angkatan Laut karena dianggap berpolitik. IMB punya surat kabar Sinar Laoetan. Seperti nama organisasi yang dulu disebut oleh Mas Arga. Sejarah rupanya tidak dilupakan oleh kelas Indonesia. Di surat kabar Sinar Laoetan, duduk dalam redaksinya Martin Marseha Paradja.

IMB tentu saja memperluas kawan dan memperkecil lawan. IMB hendak beringan dengan organisasi pergerakan nasional lain seperti Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) atau Boedi Oetomo (BO).

Kromo Lawi: Pesatuan Kesukuan: Pendekatan dengan teman-teman di tangsi-tangsi Angkatan Darat KNIL dimulai. Dirintis di Surabaya dan Malang. Di Masyarakat kita kenal tahun 25-an (1925) adanya Persatuan Bangsa Indonesia (PBI), Boedi Oetomo (BO), Pasundan, Kaoem Betawi, Persatoean Minahasa dll dan Sarekat Islam. Bentukkan Satu Nation: Di Marine kita hanya kenal satu inlanders Indonesia yang tidak mengenal perbedaan suku.<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> Riwayat Singkat Inl. Marine Bond (IMB) menurut Kromo Lawi, Pekalongan 20 Mei 1973. (Arsip Koleksi Anton Lucas).

<sup>28</sup> Citra dan perjuangan perintis kemerdekaan: Seri pemberontakan di atas Kapal Hr. Ms. De zeven Provincien, Jakarta, Direktorat Jendera Bantuan Sosial, 1980, hlm. 9.

<sup>29</sup> *Autobiografi R.H. Moh. Amin selaku perintis kemerdekaan*, Jakarta, Direktur Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial, 1986, hlm. 2.

<sup>30</sup> *Autobiografi/Biografi Perintis Kemerdekaan*, Jakarta, Direktur Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial, 1993, hlm. 55.

<sup>31</sup> Riwayat Singkat Inl. Marine Bond (IMB) menurut Kromo Lawi, Pekalongan 20 Mei 1973. (Arsip Koleksi Anton Lucas).

Kerja-kerja Lawi Soemodihardjo dkk di Indische Marine Bond (IMB) dalam memperjuangkan kenaikan upah bagi pelaut pribumi tak bisa dirampungkannya ketika menjadi anggota Angkatan Laut. Ada peristiwa yang membuatnya ikut dikeluarkan dari dinas pemerintah itu.

Anton Lucas: ... Pada bulan November 1926, bersama beberapa anggota Indische Marine Bond (IMB) lainnya, ia ditangkap atas tuduhan mendukung pemberontakan PKI di Surabaya, dan dipecat dari pekerjaannya.<sup>32</sup>

Pemberontakan PKI pada November 1926 di beberapa daerah di Pulau Jawa itu tidak hanya melibatkan anggota PKI. Belakangan beberapa anggota-anggota militer baik KNIL maupun Angkatan Laut juga terlibat. Kala itu tentara dan pelaut punya kedekatan yang tidak seperti sekarang ini.

Adanya peristiwa pemberontakan Menes pada tahun 1926 bulan November tanggal 26 Pengurus IMB diperiksa oleh komandan masing-masing dan tiada penahanan, yang sampai ditahan hanya Lawi Soemodihardjo di markas Marine Komandement Onderzeeur (MKO) dengan tuduhan terlibat Pemberontakan 1926. Januari tahun 1927 ditahan di kapal pelatih Mataram. Sepanjang pelayaran diperiksa tiap hari oleh komandan. Pelayaran telah mendekati Kepulauan di IB. Bulan Februari 1927 hasil pemeriksaan atas Lawi Soemodihardjo sebagai Sekeretaris IMB terbukti tidak ada sangkut pautnya dengan IMB dalam pemberontakan Menes 1926 dan semata-mata perjuangan nasib dan non komunis. Permulaan Maret 1927 dengan memberhentikan kapal dagang yang sedang berlayar dan papasan dengan MS Mataram, Lawi Soemodihardjo dikirim kembali ke Surabaya dengan pengawalan. Sesampai di Surabaya Lawi Soemodihardjo kembali masuk sel di MKO. 17 Maret 1927 Lawi Soemodihardjo dipecat dari dinas Marine dan diusir dari Surabaya dengan ancaman larangan masuk Surabaya.<sup>33</sup>

Lawi sempat ditahan di Sukolilo. Dia hampir dibuang ke Boven Digoel, namun itu tidak pernah terjadi. Berkat pertolongan dari orang Jerman yang seperti orangtua angkatnya itu, dia pun tetap berada di Jawa.<sup>34</sup>

Meski orang macam Lawi Soemodihardjo disingkirkan dari Angkatan Laut, namun pergerakan di Angkatan Laut terus ada demi keadaan yang lebih baik. Martin Paradja berhubungan dengan kelompok pergerakan nasional. Di kapal latihan De Zeven Provincien, Paradja tentu punya banyak kawan pribumi. Di antaranya

---

<sup>32</sup> Anton Lucas, loc. cit.

<sup>33</sup> Riwayat Singkat Inl. Marine Bond (IMB) menurut Kromo Lawi, Pekalongan 20 Mei 1973. (Arsip Koleksi Anton Lucas).

<sup>34</sup> Wawancara Dharmono Konstituanto Yoga bin Kr. Lawi Soemodihardjo, Jakarta, 3 Januari 2023.

Rumambi, Gosal, dan Kawilarang. Bahkan juga seorang Belanda berpangkat kopral yang mengurus mesin bernama Maud Boshart.<sup>35</sup>

Pemberontakan Kapal Tujuh pada bulan Februari 1933 adalah akibat dari persamaan nasib yang jadi tuntutan IMB yang belum terpenuhi. Sebagai demonstrasi kekuatan perjuangan anak-anak Marine bumiputra lakukan aksi ini, sebagai latihan gerakan.<sup>36</sup>

Jadi mereka-mereka itu benar-benar bergerak dengan menguasai kapal latihan dalam rangka memprotes penurunan gaji pada Februari 1933. Mereka mengorbankan karir Angkatan Laut mereka bahkan diantaranya telah berkorban nyawa. Apa yang mereka kerjakan adalah seperti apa yang mereka inginkan ketika Lawi Soemodihardjo masih bergabung di sana.

## 2. Mulai Membangun Banteng Pekalongan

DULU adalah masa bagi kebanyakan orang Indonesia menanggapi pekerjaan sebagai militer sebagai pekerjaan hina. Hal ini sangat berbeda sekali dengan orang Indonesia hari ini. Kini menjadi militer adalah sebuah kebanggaan.

Dipecat dari militer berarti kembali jadi orang sipil alias orang biasa. Lawi Soemodihardjo pun seharusnya menjadi Vrijzman alias orang bebas alias preman. Bagi kebanyakan orang yang tidak suka degan Belanda ini adalah kabar baik. Terlepas Lawi muda kehilangan penghasilan bulanannya. Inilah pengorbanan masa mudanya.

### Dari PNI, Partindo Lalu Gerindo

MESKI dibebaskan dan tidak dalam penjara, pengawasan pemerintah menyertai Lawi muda di tahun 1927 itu. Setelah diusir dari Surabaya, Lawi muda mudik di ke Keresidenan Pekalongan. Dimana dia bisa bertemu keluarganya dan memulai hidup baru yang membuat hidupnya nyaman di masa depan.

Kromo Lawi: Itu sampai di Pekalongan saya dijaga oleh yang dinamai Politiek Intelichtingen Dienst (PID), yang sekarang DPKN itu dulu PID, Politiek Intelichtingen Dienst dari kepolisian, jadi rumah saya itu dijaga terus oleh kepolisian sampai berjalan lama.<sup>37</sup>

PID rupanya sudah jadi lembaga generik yang memata-matai kaum pergerakan nasional. Setelah 1919, kehadiran PID sebetulnya sudah digantikan oleh *Algemeene Recherche Dienst* (ARD) atau Lembaga Polisi Rahasia, tetapi nama PID masih dipakai untuk menyebut polisi rahasia gaya baru pemerintah kolonial

<sup>35</sup> J.C.H. Bloom & Elly Touwen-Bouwsma, *De Zeven Provinciën: Ketika Kelas Indonesia Berontak 1933*, Jakarta, LIPI, 2015, hlm. 11.

<sup>36</sup> Riwayat Singkat Inl. Marine Bond (IMB) menurut Kromo Lawi, Pekalongan 20 Mei 1973. (Arsip Koleksi Anton Lucas).

<sup>37</sup> Wawancara Anton E. Lucas dengan Kromo Lawi di Pekalongan, 9 Juni 1973.

itu.<sup>38</sup> Jadi semua polisi rahasia yang mengawasi kaum pergerakan, termasuk Lawi Soemodihardjo itu, adalah PID.

Kromo Lawi: Jadi bulan maret tahun 1927 saya dikeluarkan (dari Angkatan Laut), kemudian terus saya tidak lama kemudian, antara bulan Mei saya menggabungkan diri di perkumpulan Muhammadiyah dan saya memimpin pemuda-pemuda Muhammadiyah yang dinamai Hizbul Wathan itu saya pimpin. Pada waktu saya memimpin pemuda-pemuda Hizbul Wathan itu juga yang lain-lain pemuda itu minta saya pimpin...<sup>39</sup>

Jadi Muhammadiyah yang didirikan Kyai Haji Ahmad Dahlan pada 1912 itu, telah ikut menyelamatkan perlawanannya terhadap pemerintah kolonial. Muhammadiyah, yang dikenal dengan sekolah-sekolah dan balai kesehatannya itu, termasuk organisasi perjuangan yang koperatif.<sup>40</sup> Betapa sangat bergunanya organisasi pergerakan itu bagi kaum pergerakan, termasuk yang bukan non koperatif sekali pun.

Selain Hizbul Wathan Muhammadiyah, Lawi juga memimpin National Islamiscistsch Padvinder (Nitipai) lalu Indonesische National padvinderij Organitatie (INPO) yang kemudian menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI). Kepanduan biasanya melakukan jambore, yang mana dalam acara macam ini Lawi Soemodihardjo bertemu banyak pemuda-pemuda pandu yang tidak terkait dengan Belanda.

Kromo Lawi: saya waktu itu boleh atau bisa diterima di dalam Partai Nasional Indonesia kalau saya menggabungkan dulu dengan Muhammadiyah. Itulah maka saya menggabungkan (diri) dulu dengan Muhammadiyah. Sebab saya masih dalam pengawasan polisi.

<sup>41</sup>

PID tentu membuat Lawi muda tak bisa bergerak dengan bebas. Laporan yang buruk kepada pemerintah akan mempengaruhi kebebasannya. Mau tak mau Lawi muda dipaksa menjadi lebih cerdas lagi.

Di tahun 1927, di Pekalongan diadakan Kongres Muhammadiyah. Kakak ipar dari Buya Hamka, A.R. Sutan Mansur, pernah menjadi ketua Muhammadiyah Pekalongan.<sup>42</sup>

Lawi muda yang baru 20 tahunan itu rupanya sudah jadi orang yang sangat berhati-hati.

---

<sup>38</sup> Allan Akbar, *Memata-matai Kaum Pergerakan: Dinas Intelijen Politik Hindia Belanda 1916-1934*, Serpong, Marjin Kiri, 2013, hlm. 6-7.

<sup>39</sup> Wawancara Anton E. Lucas dengan Kromo Lawi di Pekalongan, 9 Juni 1973.

<sup>40</sup> Nurcholish Madjid, *Islam: Doktrin & Peradaban*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2019, hlm. 190.

<sup>41</sup> Wawancara Anton E. Lucas dengan Kromo Lawi di Pekalongan, 9 Juni 1973.

<sup>42</sup> Hamka, *Kenang-kenangan 70 Tujuh Puluh Tahun Buya Hamka*, Jakarta, Pustaka Panjimas, 1983, hlm. 259.

Kromo Lawi: Sebab saya dijaga, sebab kalau saya tidak masuk Muhammadiyah kemudian pengawalan atau penjagaan kepada saya tidak lepas, lantas nanti dituduh nanti PNI menjadi penerus daripada Sarekat Islam, itu dihindari, jangan sampai ada tuduhan demikian, jadi saya lantas masuk Muhammadiyah dulu.<sup>43</sup>

Begitulah siasat Lawi Muda mengakali aparat intel pemerintah kolonial. Dengan begitu dia bisa bergerak lagi seperti ketika masih jadi anggota Angkatan Laut dulu. Dia lebih memilih PNI untuk kegiatan nasionalnya dan untuk keagamaannya dia berhimpun di Muhammadiyah.

Sukarno: Pada tanggal empat Juli 1927, dengan dukungan dari enam orang kawan dari Algemeene Studieclub, akumendirikan PNI, Partai Nasional Indonesia. Rakyat sudah siap. Bung Karno sudah siap. Sekarang tidak ada yang dapat menahan kami —kecuali Belanda. Tujuan daripada PNI. adalah kemerdekaan sepenuhnya.<sup>44</sup>

Semua orang Indonesai tentu kenal Sukarno. Dia seorang insinyur lulusan Technisch Hoge School (THS) alias sekolah tinggi teknik di Bandung, yang kini menjadi Institut Teknologi Bandung (ITB). Sukarno sebelumnya adalah murid dari pemimpin Sarekat Islam Haji Omar Said Tjokroaminoto.

PNI punya kesamaan lambang dengan Perhimpunan Indonesia. “Kalau lambang Perhimpunan Indonesia merah putih dengan gambar kerbau di tengahnya, maka lambang PNI juga tetap menggunakan merah putih hanya kerbau diganti dengan kepala banteng, catat Ruben Nalanan.<sup>45</sup>

Sukarno jelas lebih terpelajar daripada Lawi Soemodihardjo. Namun, orang macam Lawi ini adalah aset penting bagi Sukarno. Tanpa orang macam Lawi muda, PNI tak bisa bergerak. Orang macam Lawi muda potensial memberi PNI banyak massa di daerah. Kenyataannya, PNI mampu menggalang massa bumiputra.<sup>46</sup>

Robert Cribb & Audrey Kahin: PNI menolak menjadi anggota Volksraad (Dewan Rakyat) dan sebaliknya berupaya membangun pengikut massa dan mengklaim memiliki 10.000 anggota pada 1929. Walaupun lebih kecil daripada Sarekat Islam (SI) di masa lalu.<sup>47</sup>

---

<sup>43</sup> Wawancara Anton E. Lucas dengan Kromo Lawi di Pekalongan, 9 Juni 1973.

<sup>44</sup> Sukarno & Cindy Adams, Bung Karno Penjambung Lidah Rakjat, Jakarta, Gunung Agung, 1966, hlm. 106.

<sup>45</sup> Ruben nalanan, Arnold Mononutu, Potret Seorang Patriot, Jakarta, Gunung Agung, 1981, hlm. 96.

<sup>46</sup> Marwati Djoened Poesponegoro dkk, op. cit., hlm. 369.

<sup>47</sup> Robert Cribb & Audrey Kahin, Kamus Besar Sejarah Indonesia, Depok, Komunitas Bambu, 2012, hlm. 360.

Sejak 1927, Partai Nasional Indonesia (PNI) kemudian berdiri di Pekalongan.<sup>48</sup> Lawi Soemodihardjo diterima di PNI ketika PNI Pekalongan dipimpin Dr Notonidito, seorang ahli ekonomi. Lawi muda pada 1928 lalu menjadi pemimpinnya juga di sana, setelah Notonidito dianggap bekerjasama dengan Belanda. Kasus Notonidito itu membuat Mr Iskak Tjokroadisurjo dan Gatot Mangkupraja harus datang ke Pekalongan.<sup>49</sup>

PNI kala itu sudah berisikan orang-orang bergelar. Pemimpin tertingginya, Sukarno seorang Insinyur. Pemimpin lainnya adalah Mr Iskak Tjokroadisurjo sendiri adalah lulusan fakultas hukum Universitas Leiden.<sup>50</sup> Begitu pula di zaman Partindo.

PNI di Pekalongan adalah organisasi yang massanya tidak hanya sekedar terdaftar di atas kertas. Mereka berkumpul dan menyatakan kehadirannya serius di hadapan pemerintah kolonial.

Di Pekalongan PNI dipimpin oleh Kromolawi dimana ia menerbitkan surat kabar diberi nama Berjoang Oentoek Merdeka yang disingkat BOM. Sudah dengan sendirinya Gubernur Jenderal Cemas dan khawatir melihat perkembangan PNI dengan pesat itu. Di dalam pidatonya dihadapkan anggota Volksraad Gubernur Jenderal memperingatkan secara halus terhadap bahaya nasionalisme yang ekstrim dan sikap non koperasi yang bersifat memusuhi pemerintah.<sup>51</sup>

Nama surat kabar Berjoang Oentoek Merdeka (BOM) jelas nama yang provokatif. Nama itu terkesan agak memusuhi kebijakan kolonial Hindia Belanda. Kromo Lawi sendiri kemudian harus sering-sering dimintai pertanggungjawabannya.

Kromo Lawi kala itu disebut-sebut sebagai salah satu pengusaha Batik di Pekalongan. Pengaruhnya cukup besar.<sup>52</sup> Jaringan dan perhubungannya dengan seorang pedagang tentu luwes dengan banyak pihak. Baik dengan buruh batik maupun para tukang becak. Usaha penggalangan kekuatan kaum nasionalis di Pekalongan yang akan keras dengan Kromo Lawi itu lalu dianggap sebagai Gerakan Kromo Lawi.

Seperti yang kita ketahui dari Pekalongan, pengurus PNI cabang setempat. dipanggil kepada kepala pemerintahan setempat, yang

---

<sup>48</sup> Anton Lucas, op.cit., hlm. 328.

<sup>49</sup> Wawancara Anton E. Lucas dengan Kromo Lawi di Pekalongan, 9 Juni 1973.

<sup>50</sup> Kami perkenalkan, Jakarta, Departemen Penerangan Indonesia, 1954, hlm. 25.

<sup>51</sup> Bambang Suwondo, Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jawa Tengah, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977m hlm. 146.

<sup>52</sup> J. Mardimin, *Perlawanan Politik Santri: i Kajian tentang Pudarnya Kewibawaan dan Pengaruh Kiai, Perlawanan Politik Santri, serta Dampaknya bagi Perkembangan Partai-partai Politik Islam di Pekalongan* (disertasi), Salatiga, Doktor Studi Pembangunan Program Pascasarjana UKSW, 2016, hlm, 126.

menuding kepada Ketua Lawi dan rekan-rekan pengurusnya bahwa menurut informasi yang diperoleh, rapat-rapat kursus yang diadakan oleh seksi PNI digunakan untuk melakukan tindakan anti penguasa. Residen menunjukkan kepada anggota dewan bahwa tindakan ini harus diakhiri, jika tidak, langkah-langkah akan diambil untuk mencegah kelanjutan pertemuan kursus yang dimaksud. Secara alami, dewan departemen menyangkal tindakan anti-otoritas dan berpendapat bahwa masalah dibatasi dalam batas subjek. Residen, yang, kami pelajari, memiliki data yang membuat penyangkalan itu batal demi hukum, mengulangi peringatannya dan dengan itu tuantuan bisa pergi. Pada Kamis malam terjadi insiden kecil, yang jelas menunjukkan bahwa PNI Pekalongan mulai 'merasa'. Di awal pertemuan kursus seksi, polisi hadir seperti biasa untuk memeriksa apakah para pengunjung memiliki kartu anggota mereka. Ketua, sebut Lawi sebelumnya, menganggap polisi tidak ada hubungannya dengan kartu anggota. Ketika dijelaskan kepadanya bahwa dia juga harus menunjukkan kartunya atau dia tidak akan diizinkan untuk menghadiri pertemuan tersebut, Lawi menyatakan bahwa jika demikian maka pertemuan tidak akan terjadi. Lima puluh enam puluh orang yang hadir diberitahu bahwa pertemuan telah dibatalkan. Mereka bubar menyanyikan lagu-lagu kebangsaan.<sup>53</sup>

Ketika PNI bergelut di Pekalongan, PNI menjadi bahan pengawasan polisi kolonial yang berniat menjaga *rust en orde* bagi Hindia Belanda. Lawi Muda tidak sampai setahun memimpin PNI di sana. Sebab PNI hanya berumur singkat karena pemerintah kolonial menganggapnya berbahaya. Padahal perkembangan PNI di kota kecil Pekalongan cukuplah baik perkembangannya.

Anton Lucas: Sampai dengan Desember 1929, PNI mempunyai lebih dari 500-an anggota. Mereka berhasil meletakkan program-programnya secara teratur dengan dana keuangan yang cukup banyak. Penggeledahan rumah-rumah anggota dan penangkapan Kromo Lawi pada akhir Desember 1929 diikuti dengan penahanannya selama lima bulan, mengakibatkan banyaknya pedagang Minangkabau yang menjadi pendukung PNI kembali ke Padang.<sup>54</sup>

Pergerakan nasional antara kota satu dengan kota lain punya keadaan berbeda. Selain masalah sumber daya manusia, gangguan dari aparat intel kolonial tentu mempengaruhi pergerakan kaum pribumi dan lainnya.

J. Mardimin: Dibawah pimpinan Kromo Lawi, PNI Cabang Pekalongan berkembang cukup pesat. Mereka cukup berhasil

<sup>53</sup> Ean PNI Incident te Pekalongan, De locomotief 13-07-1929

<sup>54</sup> Anton Lucas, op. cit., hlm. 29.

meletakkan program-programnya secara teratur dengan keuangan yang cukup kuat juga.<sup>55</sup>

Gerakan PNI Pekalongan yang dipimpin Kromo Lawi itu tak bisa dilepaskan dari perlindungan orang-orang Muhammadiyah di sana. Kala itu kakak ipar Buaya Hamka sempat jadi orang berpengaruh di sana.

Setelah pecah Pemberontakan PKI 1926 lalu disusul dengan krisis ekonomi dunia yang dikenal sebagai *Malaise* pada 1929, yang oleh kebanyakan orang Indonesia disebut zaman meleset, pemerintah kolonial makin keras terhadap gerakan politik bumiputra. Termasuk kepada Sukarno dkk.

Sukarno: Gubernur Jenderal yang menyatakan kegiatanku sebagai persoalan yang serius memperingatkan, bahwa ia sangat menyesalkan sikap non-kooperasi dari PNI, yang katanya “mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan kekuasaan Belanda.” Bulan Desember 1928 aku berhasil mengadakan suatu federasi dari partaiku sendiri —Partai Nasional Indonesia— dengan semuapartai-partai utama yang berhaluan kebangsaan. Permusyawaratan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia ini, yang disingkat PPPKI, memungkinkan kami bergerak dengan satuan kekuatan yang lebih besar daripada yang pernah terjadi sebelumnya.<sup>56</sup>

Setelah PNI dibubarkan dan pemimpin besarnya Sukarno dipenjarakan di Sukamiskin, para bekas PNI kemudian banyak berhimpun di tempat lain dan tidak berhenti bergerak. Pengurus yang tersisa ketika PNI dilarang mengadakan pertemuan pada 25 April 1931 di Gedung Permusyawaratan nasional di gang Kenari Jakarta. Lawi hadir di sana bersama wakil-wakil PNI dari daerah lain.<sup>57</sup>

Ketika aku masuk penjara Sukamiskin, PNI dengan resmi dinyatakan sebagai partai terlarang. Kemudian, wakil-wakil kumendirikan Partai Indonesia, yang disingkat Partindo, akan tetapi pergerakan itu tetap tidak berdaya. Kegiatannya terbatas, jarang mengadakan pertemuan-pertemuan dan walaupun diadakan, sedikit sekali dikunjungi orang, karena tidak adanya tokoh yang menjadi lambang kekuatan.<sup>58</sup>

Partindo dipimpin oleh Mr Sartono, yang juga seorang lulusan hukum dari Universitas Leiden.<sup>59</sup> Selain Partindo dan kala itu muncul pula Pendidikan Nasional Indonesia yang disebut sebagai PNI Baru yang dipimpin Sutan Sjahrir dan Drs Hatta.

---

<sup>55</sup> J. Mardimin, *loc. cit.*

<sup>56</sup> Sukarno & Cindy Adams, *op. cit.*, hlm. 117.

<sup>57</sup> Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jawa Tengah, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977, hlm. 128.

<sup>58</sup> Sukarno & Cindy Adams, *op. cit.*, hlm. 156.

<sup>59</sup> Kami Perkenalkan, *op. cit.*, hlm. 66.

"Dalam pidatonya itu ia menyatakan tidak berfihak kepada salah satu dari keduanya itu, melainkan akan berusaha untuk mempersatukannya kembali. Akan tetapi kemudian ia masuk PARTINDO juga . Kongres pertama PARTINDO akan diadakan di Jakarta pada akhir tahun 1931. Dua orang utusan PARTINDO cabang Pekalongan, yakni Lawi dan Yahya Nasution, kedua-duanya sahabat dan murid Ir. Sukarno, sengaja menuju ke Bandung dulu untuk menjumpai Ir. Sukarno guna mengusahakan agar Ir . Sukarno dapat masuk Partindo.<sup>60</sup>

Setelah PNI bubar, harta yang terkumpul oleh PNI Pekalongan cukuplah banyak. Partindo yang baru berdiri tidak hendak mengambilnya untuk perjuangan mereka. Harta PNI Pekalongan lalu berganti tangan.

Nyak Kekayaan cabang Pekalongan barang - barang diurus oleh Komite terdiri atas saudara-saudara Kromo Lawi, Yahya, Y. Yusuf untuk diserahkan pada pendirian-pendirian nasional yang dianggap perlu. Uang pada fonds Taman Siswa buat bell alat sekolah (penyerahan dikuasakan pada Tuan Kromo Lawi).<sup>61</sup>

Ternyata harta itu dihibahkan ke lembaga lain yang terkait pergerakan nasional juga. Partindo dibawah Kromo Lawi tentu berjuang mengumpulkan dana perjuangan lagi.

Kerja Lawi muda pada 1929 adalah mendirikan Sarekat Kaum Buruh. Bergiat bersama buruh dan tani adalah hal penting, sebab golongan-golongan pekerja itu adalah sumber kekuatan.

Pada bulan April 1931 ia membubarkan cabang PNI dan memberikan dana keuangan partai itu kepada Taman Siswa, tetapi dalam bulan Juni tahun itu juga ia menjadi ketua cabang Partindo, partai yang dibentuk Mr. Sartono setelah PNI dibubarkan.<sup>62</sup>

Lawi muda tentu sambil terus menjadi bagian dari kelompok nasionalis dengan berhimpun di Partindo. Di Pekalongan dia meneruskan nafas PNI dengan Partindo sebagai tubuhnya yang baru.

Setelah masa istirahat yang nyata, Partai Nasionalis Indonesia di Pekalongan mulai bangkit kembali dengan nama baru Partai Indonesia. PI di Pekalongan ini pada hakikatnya sama dengan mantan

---

<sup>60</sup> Abdul Haris Nasution, *Seputar Perang Kemerdekaan 1: Proklamasi*, Bandung, Disjarah AD, 1977, hlm. 57.

<sup>61</sup> Nyak Wali AT, *Mr Sartono Karya dan Pengabdiannya*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985, hlm. 70

<sup>62</sup> Anton Lucas, *op. cit.*, hlm. 328.

Partai Nasionalis Indonesia itu. karena calon anggota organisasi yang baru berdiri semuanya mantan PNI. anggota, sedangkan pimpinan tetap berada di tangan Kr. Lawi, yang menjadi ketua PNI sejak akhir tahun 1928. Dewan definitif telah dipilih dengan dewan tertinggi Kr. Lawi sebagai ketua, Amin (mantan sekretaris PNI) sebagai sekretaris dan Chatib Salim sebagai bendahara. Lawi berada di Batavia pada tanggal 12 bulan ini untuk menghadiri kongres di sana, di mana seperti diketahui, jurusan Pekalongan juga didirikan. Di bawah dewan di atas, dibantu beberapa intelektual di Pekalongan, yang bersimpati dengan prinsip Ir. Sukarno, Partai Indonesia di Pekalongan berjanji akan menjadi divisi yang kuat, lapor A.I.D.<sup>63</sup>

Partindo tentu menampung para pemuda di dalamnya. Sebab pemuda sudah dianggap kekuatan perubahan di masa itu. Di dalam Partindo terdapat Persatoean Pemoeda Rakjat Indonesia (Perpri).

Di zaman Partindo inilah Lawi Soemodihardjo dapat nama depan Kromo, yang biasa disingkat Kr. Kala itu, Partindo sedang mengadakan kongres di Surabaya. Sudiro, yang belakangan pernah menjadi Walikota Jakarta, hadir dalam pertemuan itu. Menurut Sudiro, saat itulah Lawi minta gelar kehormatan kepada Sukarno dan secara spontan Sukarno terpikirkan gelar unik bernama kromo yang disingkat Kr<sup>64</sup>.

Kromo Lawi: Jadi, (nama) Kromo Lawi itu setelah saya di dalam Partai Nasional Indonesia, waktu itu semua cabang-cabang dipimpin oleh para akademisi, dipimpin oleh Meester in Rechten, oleh insinyur, oleh doktor tapi di Pekalongan justru tidak ada [...] maka salah satu daripada ketua cabang yang ada di PNI itu kemudian Bung Karno memberikan nama saya Kromo, karena singkatan Kr.<sup>65</sup>

Jadi selain dr, Mr dan Ir, PNI punya orang dengan gelar Kr, yang artinya Kromo. Kromo bisa diartikan sebagai: nama orang yang dipakai sebagai lambang yang menggambarkan rakyat kecil atau orang kebanyakan.<sup>66</sup>

Nama Kromo jelas menjadi nama yang merakyat. PNI sendiri adalah partai massa yang menjadi kuat karena kerakyatan. PNI tentu menjadikan Marhaen, petani yang punya alat produksi dan rumah sendiri itu sebagai bagian dari rakyat juga.

Nama Kromo Lawi dengan singkatan Kr. Lawi setidaknya pada 1931 sudah ada di surat kabar kolonial De Locomotief, setelah dia aktif Partindo.<sup>67</sup> Lagi-lagi Partindo dianggap sama berbahayanya oleh pemerintah kolonial. Kegiatan di PNI dan Partindo membuat Lawi muda harus keluar masuk tahanan polisi kolonial. Kejadian tahun 1929 dialami lagi oleh Kromo Lawi di tahun 1933.

<sup>63</sup> Partai Indonesia Te Pekalongan, De Sumatra Post 29-07-1931

<sup>64</sup> Soebagijo IN, Sudiro, Pejuang Tanpa Henti, Jakarta, Gunung Agung, 1981, hlm. 60.

<sup>65</sup> Wawancara Anton E. Lucas dengan Kromo Lawi di Pekalongan, 29 Mei 1973.

<sup>66</sup> Sudaryanto, Daftar Kosakata Bahasa Jawa dalam Bahasa Indonesia, Yogyakarta, Samudra Biru, 2017, hlm. 27.

<sup>67</sup> Partai Indonesia Te Pekalongan, De Sumatra Post 29-07-1931

Bataviaasch Nieuwsblad: Ketua cabang Partindo ditangkap. Kami diberitahu bahwa Lawi, ketua seksi pengurus Partindo di Pekalongan, ditangkap tadi malam di Sukabumi dan ditempatkan dalam perlindungan. Penangkapan itu terjadi atas permintaan BB (Binnenlaan Bestuur alias Departemen Dalam Negeri) di Pekalongan, ditujukan kepada Residen Batavia, karena pada awalnya diketahui bahwa yang bersangkutan menginap di rumah Mr Sartono di Meester Cornelis (Jatinegara). Ketua Dewan organisasi menyebutkan: Lawi memang mengunjungi Pak Sartono kemudian melanjutkan perjalanan ke Sukabumi.<sup>68</sup>

Ketika itu, pemerintah kolonial sudah dibuat pusing oleh pemberontakan para kelasi Angkatan Laut Belanda pada awal Februari 1933 dalam Pemberontakan Zeven Provinciën. Di mana Kerajaan Belanda menanggapi pemberontakan itu dengan melemparkan bom dari pesawat Dornier yang membuat banyak korban jatuh.<sup>69</sup>

Gagalnya pemberontakan Kelasi Angkatan Laut itu, tentu membuat orang macam Kromo Lawi yang bekas kelasi Angkatan Laut ini terus diawasi lagi. Kegiatan politiknya tentu dianggap sebagai bahaya tersendiri.

Kromo Lawi sendiri semakin dikenal banyak orang di sekitar wilayah Keresidenan Pekalongan. Setidaknya oleh Ahmad Dahlan Ranuwihardjo (1925-2001) yang masih belia. Keponakan Mohamad Roem ini terlahir di Pekalongan dan sekolah dasar di Pekalongan.

Kromo Lawi adalah Ketua PNI Pekalongan yang seputar tahun 1930 keluar masuk penjara karena keaktifannya di PNI. Sewaktu pada awal tahun 1930-an saya menjadi anggota Athfal (Kurcaci) yaitu bagian dari Hizbul Wathon di Pekalongan, Kromo Lawi adalah Pemimpin Seluruh Hizbul Wathan di Pekalongan.<sup>70</sup>

Tak hanya Dahlan, tapi juga Sarino Mangunpranoto. Kala itu Sarino sudah menjadi seorang guru Taman Siswa. Pemuda kelahiran Purworejo 15 Januari 1911 ini adalah lulusan MULO. Sebagai anak muda dia berusaha belajar politik kepada yang yang lebih senior dan berpengalaman darinya.

Sarino Mangunpranoto: karena hasrat yang kuat ingin belajar banyak dalam gerakan politik maka pada waktu itu di Pemalang saya hanya " Penasehat " " Pengurus " " Partindo " " Cabang Pemalang sambil mengikuti kursus politik yang dipimpin oleh Bapak Kromolawi di Pekalongan. Selanjutnya saya memberi kursus tentang arti

---

<sup>68</sup> Afdelingsvoorzitter van Partindo gearresteerd, Bataviaasch Nieuwsblad 09-08-1933

<sup>69</sup> Zeven Provinciën VIII, Oetoesan Indonesia, 21 November 1933.

<sup>70</sup> Dahlan Ranuwihardjo, Biografi, pemikiran, dan perjuangan A. Dahlan Ranuwihardjo, Jakarta Lembaga Studi Informasi Pembangunan, 1995, hlm. 197.

kolonialisme dan imperialisme pada para anggota Partindo di Pematang.<sup>71</sup>

Ketika di Partindo, pada tahun 1933, Sarino bertemu dengan Sukarno dalam rapat umum Partindo. Belakangan, Sarino menjadi politisi di PNI setelah Indonesia merdeka dan sempat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Berkali-kali berorganisasi, berkali-kali pula organisasi politik yang dipimpin Kromo Lawi diganyang pemerintah kolonial. Tentu saja Kromo Lawi dan yang lainnya berkali-kali bangkit melawan kebijakan buruk pemerintah kolonial dan berusaha menuntut perubahan lagi.

Partindo lalu dibekap oleh pemerintah kolonial. Partindo dibubarkan pada 18 November 1936.<sup>72</sup> Tepat 18 tahun setelah Gubernur Jenderal Johan Paul graaf van Limburg Stirum berpidato di Volksraad (Dewan Rakyat) akan adanya perubahan struktur dan pembaruan pemerintah kolonial Hindia Belanda pada 18 November 1918.

Kromo Lawi: ...bulan Desember tahun 1929 PNI dibubarkan dan kemudian Partai Indonesia tahun 1932 juga saya menjadi ketuanya dan pada tahun 1934 Partindo itu kemudian terus menjadi Gerakan Rakyat Indonesia.<sup>73</sup>

Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) berdiri pada 24 Mei 1937, partai ini semacam Partindo baru. Kromo Lawi juga aktif di Gerindo dan sempat menjadi ketuanya.

Menurut kolega Sukarno, Ali Sastroamidjojo, Gerindo adalah bukti bahwa pembubaran Partindo tidak membuat kelompok nasionalis kiri menjadi putus asa. Pemimpin terkemuka Gerindo antara lain: Adnan Kapau Gani, Amir Sjarifuddin, Sarmidi Mangunsaskoro, Njonoprawoto dan Mohamad Yamin. Mereka yakin tidak akan ditinggalkan rakyat yang sebelumnya mendukung PNI atau Partindo.<sup>74</sup>

Ada partai lain setelah era Partindo. Partai yang enggan diikuti Kromo Lawi. Di partai ini ada Margono Djojohadikusumo kakek Prabowo Subianto. Konon, Margono dapat kepercayaan dari Sukarno untuk meneruskan PNI melalui sebuah surat kuasa..

Dalam surat kuasa itu, Bung Karno memberi nama partai yang menggantikan PNI yaitu Parindra, Partai Indonesia Raya. Pak Margono ditugaskan sebagai Ketua Umum. Pak Margono waktu itu tidak ditangkap Belanda, karena waktu itu ia merupakan pegawai negeri Belanda. Setelah beberapa tahun Bung Karno kembali ke Jakarta, setelah dibebaskan dari pengasingan, langsung Pak Margono menghadap Bung Karno dan menyerahkan kembali surat kuasa

<sup>71</sup> Bunga rampai Soemph Pemoeda, Jakarta, Balai Pustaka, 1978, hlm. 199.

<sup>72</sup> Ali Sastroamidjojo, Tonggak-tonggak Perjalanaku, Jakarta, Kinta, 1974, hlm. 116-117.

<sup>73</sup> Wawancara Anton E. Lucas dengan Kromo Lawi di Pekalongan, 9 Juni 1973.

<sup>74</sup> Ali Sastroamidjojo, op. cit., hlm. 117.

tersebut. Pak Margono mengatakan, "Bung, dengan ini saya kembalikan surat kuasa, dan dengan demikian PARINDRA kita bubarkan untuk bersatu dalam perjuangan kemerdekaan."<sup>75</sup>

Parindra adalah penerus Partai Bangsa Indonesia (PBI). Menurut Kromo Lawi, Parindra berisikan para priyayi. Kromo Lawi lalu lebih suka bersama Gerindo yang menurutnya memakai azas lama yang Non Koperatif, yang berbeda dengan Parindra.

Kromo Lawi di tahun 1938 ikut terlibat dalam menggalang adanya Indonesia Berparlemen.<sup>76</sup> Namun usaha Indonesia Berparlemen yang dilakukannya Gabungan Politik Indonesia (GAPI) itu tak mendapat tanggapan yang baik bagi pemerintah kolonial dan Kerajaan Belanda,

Kala itu, pemerintah kolonial dan Kerajaan Belanda belum mau memberikan ruang besar kepada orang-orang Indonesia untuk dalam sebuah parlemen di dalam Kerajaan Belanda. Tanpa parlemen untuk orang Indonesia, maka Kerajaan Belanda makin menjauhkan dirinya dari rakyat Indonesia. Sebuah sumber daya potensial yang kurang diperlakukan dengan baik sebelum Perang Dunia II meletus. Sejarah pertempuran melawan tentara Jepang di awal tahun 1942 tentu bisa lebih keras jika rakyat Indonesia diperlakukan dengan baik dalam sebuah parlemen dan kesempatan hidup yang layak.

### **Memperalat Putera Demi Kepentingan Nasional**

PEKALONGAN di masa lalu adalah kota yang unik dalam sikap kebanyakan rakyatnya kepada priyayi. Golongan berdarah biru itu justru dianggap hina oleh sebagian kalangan di Pekalongan. Jika ada seorang anak laki-laki yang nakal maka si orang tua akan beri ancaman dengan bilang "ngko tak rabi ro priyayi lo" kepada anaknya itu.<sup>77</sup>

Ketika tentara Jepang akan memasuki Hindia Belanda, di beberapa kota Jawa tampak terlihat persiapan pertahanan yang tergolong buruk. Di Pekalongan pun keadaan juga tidak begitu baik bagi Hindia Belanda. Hindia Belanda tampak tinggal menunggu hari kejatuhannya kepada tentara Jepang.

Di seluruh keresidenan Pekalongan sama sekali tak ada pasukan-pasukan pertahanan. Adanya hanya pasukan-pasukan kepolisian untuk keamanan dalam keadaan normal. Di samping itu ada pasukan-pasukan seperti sukarelawan sekarang ini juga disebut "stadswacht" untuk pertahanan kota, dan "landwacht" untuk pertahanan luar kota, yang kekuatannya tak seberapa.<sup>78</sup>

---

<sup>75</sup> Prabowo Subianto, *Kepemimpinan Militer*, Jakarta, Media Pandu Bangsa, 2022, hlm. 310.

<sup>76</sup> Wawancara Anton E. Lucas dengan Kromo Lawi di Pekalongan, 9 Juni 1973.

<sup>77</sup> Wawancara Dharmono Konstituanto Yoga bin Kr. Lawi Soemodihardjo, Pekalongan 20 Januari 2023.

<sup>78</sup> Sarimin Reksodihardjo, *Kenang-kenangan Dari Masa Jang Silam* (Sebuah Manuskrip), Bandung, 1965, hlm. 88.

Angkatan perang bernama KNIL begitu minim di sekitar Pekalongan. Angkatan Laut tempat Kromo Lawi dulu berdinastikan pun tidak berdaya di lautan melawan armada laut militer Jepang. Hingga dengan mudah tentara Jepang pada Maret 1942 sudah mendarat di Jawa. Pertahanan Hindia Belanda hanya bisa mundur teratur ke pedalaman sebelum akhirnya menyerah. Kedatangan Jepang menimbulkan kekacauan di masyarakat.

Di Pekalongan, Kromo Lawi tentu berhadapan dengan priyayi yang di zaman Hindia Belanda adalah golongan yang mengabdikan kepada pemerintah kolonial. Di masa pendudukan Jepang golongan priyayi ini kehilangan pemasukannya dan terpaksa bekerja kepada Jepang.

Di masa pendudukan Jepang, sebagai bekas musuh pemerintah kolonial, Kromo Lawi justru diberdayakan oleh pemerintah militer Jepang di Pekalongan. Seperti Sukarno yang diikutinya, Kromo Lawi mengambil langkah seperti Sukarno. Rela bekerja untuk Jepang.

Sebelum masa pendudukan Jepang, Kromo Lawi direpotkan PID, yang mana para mantrinya adalah berasal dari golongan priyayi. Tak mengherankan jika Kromo Lawi tak menyukai golongan priyayi yang duduk dalam pemerintahan. Di zaman pendudukan Jepang, Kromo Lawi tampak punya daya melawan kaum priyayi dibandingkan masa-masa sebelumnya. Priyayi birokrat, bagi Kromo Lawi adalah: bidak (pion) pemerintah kolonial.

Pada zaman baru yang penuh ketidakpastian dan kekuarangan itu, Kromo Lawi pun diberi posisi dalam Pusat Tenaga Rakyat (Putera). Selain itu Kromo Lawi juga dijadikan anggota Shu Sangi Kai (dewan penasehat) keresidenan Pekalongan. Putera dipimpin oleh Ir Sukarno, dengan dibantu para nasionalis Indonesia lainnya.

Sukarno: Tokyo menganggap Pusat Tenaga Rakyat ini sebagai alat Sukarno untuk mengerahkan rakyat di garis belakang bagi kepentingan peperangan mereka. Tapi Sukarno mengartikannya sebagai alat yang nomor dua paling baik untuk melengkapkan suatu badan penggerak politik yang sempurna.<sup>79</sup>

Kromo Lawi juga punya pendapatnya sendiri tentang Putera.

Dengan bentukan Putera itu adalah ingin kita menunjukkan rakyat kita itu supaya tetap bisa berjuang, rakyat kita supaya tetap bisa berjuang di dalam Jepang di sini, jadi saya hanya meneruskan perjuangan saja.<sup>80</sup>

Di zaman pendudukan Jepang itu, Pekalongan kedatangan seorang bekas PNI. Namanya Sarli. Dia kelahiran Klaten 14 September 1915 Dia mantan guru HIS di Perguruan Rakjat dan pernah menjadi tahanan Jepang hingga 1943 dan sebelumnya pernah pula sekitar 1936-1937, dipenjarakan oleh aparat kolonial Belanda.<sup>81</sup> Di

<sup>79</sup> Sukarno & Cindy Adams, Bung Karno Penjambung Lidah Rakjat, Jakarta, Gunung Agung, 1966, hlm. 271.

<sup>80</sup> Wawancara Anton E. Lucas dengan Kromo Lawi di Pekalongan, 29 Mei 1973.

<sup>81</sup> Sarli, Autobiografi Sarli Selaku Perintis Kemerdekaan, Jakarta, Departemen Sosial RI, 1986, hlm.47

Pekalongan, Sarli bekerja dibawah Kromo Lawi di Putera. Sarli kerap ikut Kromo Lawi dalam banyak pertemuan dengan rakyat.<sup>82</sup>

Sarli: 8 Januari 1944, saya mulai bekerja di PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat) Pekalongan, yang diketuai Saudara Kromo Lawi (Ketua Partindo Pekalongan). Diadakan bagian-bagian: penerangan, organisasi, pendidikan, usaha, penyiaran dan tata usaha, dan dipimpin oleh Sumaheru (PNI), Subagyo (PNI), MS Latief (Partai Sarekat Islam Indonesia), Sarli, Kuseheri (Perpri) dan Kadarisman.<sup>83</sup>

Sukarno menjadikan Putera sebagai tempat untuk meringankan masalah dalam di nusantara. Sebagai tukang pidato, Sukarno menggerakkan rakyat yang sedang sulit agar tidak putus asa dan berharap agar mereka keluar dari masalah ekonomi akibat Perang Dunia II tersebut. Diantaranya Sukarno pernah menyerukan agar menanam rosella yang akarnya bisa dijadikan bahan tenunan kain.<sup>84</sup>

Putera kemudian dibubarkan dan sebagai gantinya, untuk mendapat dukungan orang-orang Indonesia di Jawa, pada awal 1944, militer Jepang membentuk Jawa Hokokai.

Jadi dengan Jawa Hokokai itu lahirlah yang dinamai *Sangi in dan Sangi Kai*, Sangi in dan Sangi Kai itu adalah dewannya Jawa Hokokai, Sangi in itu ada di pusat, Sangi Kai ada di daerah, daerah-daerah luar pusat.<sup>85</sup>

Meski pengawasan di zaman pendudukan Jepang lebih ketat, Kromo Lawi tetap bergerak. Kedudukannya yang cukup nyaman di Pekalongan sebenarnya bisa membuatnya memilih hidup tenang, bersama priyayi-priyayi lain yang dipekerjakan oleh militer Jepang di Pekalongan. Di zaman pendudukan Jepang, Kromo Lawi sudah punya istri dan anak-anak. Namun, Kromo Lawi memilih melanjutkan geloranya sejak muda dulu, bergerak.

Kali ini kecerdasan dan keberanian dalam bergerak sangat diperlukan oleh orang-orang macam Kromo Lawi. Baik di Pekalongan atau daerah pendudukan Jepang lainnya. Ancaman kematian amat besar jika ketahuan menentang pemerintah balatentara Jepang. Kromo Lawi tentu saja berpolitik bermodalkan kedudukan pentingnya di Pekalongan yang didapatnya dari pemerintah militer Jepang.

Di Kota Pekalongan, tokoh nasionalis Kromo Lawi. dengan menggunakan front resmi Putera, yang diketuainya. dan dalam kedudukannya sebagai anggota Shu Sangi Kai keresidenan

---

<sup>82</sup> Anton Lucas, op. cit., ???

<sup>83</sup> Sarli, op. cit., hlm. 27. (isinya mirip dengan Manuskrip Memoar Sarli Koleksi Arsip Digital Anton Lucas.

<sup>84</sup> Sukarno, loc. cit.

<sup>85</sup> Wawancara Anton E. Lucas dengan Kromo Lawi di Pekalongan, 29 Mei 1973.

menyelenggarakan kursus-kursus politik dan mengadakan pertemuan-pertemuan. Di daerah pedesaan, kegiatan ini diselenggarakan camat setempat, yang oleh Kromo Lawi dijuluki sebagai "bidak (pion) pemerintah kolonial." Menurut seorang nasionalis Pekalongan yang menyertai Kromo Lawi dalam rapat-rapat, "para camat setempat itu takut mereka memperlakukan kami sebagai orang Jepang".<sup>86</sup>

Orang yang bekerja sama dengan Jepang macam Kromo Lawi biasanya dicap sebagai kolaborator. "Jadi saya ini dianggap sebagai kolaborator," Krolo Lawi. Hingga belakangan hal itu menjadi alasan dirinya berusaha disingkirkan golongan tertentu.

Kebanyakan orang Indonesia kelas bawah zaman itu, selama tidak dipersulit hidupnya oleh militer Jepang, tidaklah akan ambil pusing dengan orang-orang yang dianggap kolaborator itu. Golongan yang dipersulit Jepang, terutama golongan priyayi yang dulunya pernah bekerja untuk pemerintah kolonial Belanda cenderung tidak menyukai Kromo Lawi.

Tersebutlah Jalan Permi di Pekalongan. Di sana anak-anak priyayi yang tergolong orang terpelajar tinggal. Mereka tidak menyukai masa-masa pendudukan Jepang. Bahkan kala itu tersebar desas-desus pemerintah Hindia Belanda akan datang kembali. Mereka dianggap sebagai Pemuda Permi. Mereka tidak menyukai Kromo Lawi. Kelompok nasionalis dan Islam jadi pengimbang elite penguasa Indonesia.<sup>87</sup> Jadi ketika Belanda tak ada, anak kandung Hindia Belanda yang disebut priyayi itu, terganggu oleh pribumi macam Kromo Lawi jadi orang biasa.

Rumah priyayi Jawa, oleh pejabat Belanda yang sudah kabur ke Australia macam Charles van der Plas, kerap dijadikan alamat tujuan bagi mata-mata sekutu yang dikirim diam-diam dari Australia. Sersan penerbang Iswahjoedi pernah dikirim van der Plas dalam misi atas nama NEFIS ke rumah Bupati Ario Pujo.<sup>88</sup>

Jadi di Pekalongan pada zaman pendudukan Jepang, golongan yang dipekerjakan militer Jepang telah terpecah-pecah. Masalah masa lalu antara golongan priyayi dengan Kromo Lawi dkk tak diselesaikan antar mereka dengan baik. Hingga perseteruan berlanjut di zaman pendudukan Jepang.

Anton Lucas: Kenyataannya, hubungan antara beberapa pejabat Pekalongan dengan Kromo Lawi, Sarli dan kelompok kecil nasionalis radikal di ibukota keresidenan itu telah memburuk semasa pendudukan. Kromo Lawi diberi kedudukan tinggi oleh Jepang dengan menjadi ketua pertama Putera, lalu menjadi kepala Seksi Perdagangan Hokokai dan pemimpin Barisan Pelopor. Pangreh praja tidak menyenangkannya, karena ia rajin mengunjungi wilayah-wilayah kecamatan-nya dan pidato-pidatonya mengenai kemerdekaan dalam kursus-kursus Putera yang kemudian menjadi Hokokai. Mereka juga

<sup>86</sup> Anton Lucas, op. cit., hlm. 70.

<sup>87</sup> Anton Lucas, op. cit., hlm. 95.

<sup>88</sup> Louis de Jong, *Het Koninkrijk de Nederlanden in de Tweede Waredoorlog—Deel III C Nederlands-Indie III*, Leiden, Martinus Nijhoff, 1986, hlm. 56.

benci pada cara Kromo Lawi mengambil alih rumah kediaman wedana Pekalongan untuk dijadikan kantor Putera.<sup>89</sup>

Tak heran jika para priyayi di Pekalongan jadi kurang menyukainya. Kaum priyayi itu juga merasa mencurigai pula laporan-laporan tertentu yang disampaikan kepada Jepang yang merugikan pangreh praja dan mengakibatkan mereka ditegur atau dipecat. Tetapi ternyata kalangan priayi tidak berhasil menggeser kedudukannya. Kromo Lawi kemudian melindungi dirinya dengan jalan mendekati Kempeitai.

Kempeitai adalah polisi militer dengan kemampuan intelijennya, serta dikenal kejam. Sikap Kempeitai secara umum tidaklah bersahabat dengan orang-orang Indonesia. Sikap ringan tangan mereka kepada seseorang yang belum tentu bersalah membuat militer pendudukan Jepang jadi kurang disukai.

Jadi dengan tindakan-tindakan Jepang yang mudah memukul orang, jadi karena tindakan-tindakan keras itu, itu yang merenggangkan orang kita dengan Jepang. Tindakan keras itu, saya sendiri itu barangkali hampir dua jam dibanting oleh Jepang.<sup>90</sup>

Markas Kempeitai kala itu sebelumnya adalah Java Hotel. Lahan bangunan tersebut sebelumnya pernah dimiliki seorang Belanda keturunan Yahudi.<sup>91</sup> Bangunan batu di zaman itu adalah kemewahan. Umumnya bangunan di pusat kota kerap menjadi kantor atau markas militer di zaman Jepang.

Kedudukan Kromo Lawi di Putera dan Jawa Hokokai sangatlah penting bagi militer Jepang. Sumber daya yang minim di nusantara kala itu hendak diberdayakan militer Jepang untuk menghadapi perang melawan sekutu.

Kromo Lawi, seorang Sukarno's dari Pekalongan angkatan lama, selaku ketua Putera (Pusat Tenaga Rakyat) Keresidenan Pekalongan, terlibat dengan urusan pengiriman romusha ke luar wilayah keresidenan sejak awal masa pendudukan. Ia selalu pergi mengunjungi romusha dari Pekalongan di tambang batu-bara Bayah karena sebagai kepala Putera merasa cukup berwibawa untuk memastikan bahwa para romushanya memperoleh perlakuan layak, dan memperoleh giliran penggantian tiap dua minggu.<sup>92</sup>

Romusha yang di zaman itu disanjung sebagai Pahlawan Pekerja oleh militer Jepang, diberdayakan untuk membangun proyek-proyek militer Jepang demi kemenangan perang. Bayah, yang menjadi tempat penyamaran Tan Malaka, adalah daerah penghasil batubara yang berguna untuk industri Jepang.

<sup>89</sup> Anton Lucas, op. cit., hlm. 95.

<sup>90</sup> Wawancara Anton E. Lucas dengan Kromo Lawi di Pekalongan, 29 Mei 1973.

<sup>91</sup> Mochtar Mas'oed dkk, Kekerasan kolektif kondisi dan pemicu, Yogyakarta, P3PK UGM, 2001, hlm. 236.

<sup>92</sup> Anton Lucas, op. cit., hlm. 59.

Pergantian tenaga kerja itu tentu akan mengantisipasi penyakit dan kelaparan yang membuat para pekerja paksa itu menderita. Selain mengadakan romusha, di zaman Jepang juga diadakan berbagai macam barisan dan pasukan militer yang dipersiapkan untuk pertempuran, seperti tentara sukarela Pembela Tanah Air (PETA) dan Heiho (pembantu tentara) di wilayah Jawa.

Untuk Romusha diadakan Badan Pembantu Prajurit Pekerja (BP3). Untuk PETA dan Heiho diadakan Badan Pembantu Prajurit (BP2), yang diantara kerjanya adalah mengatur jatah dan hiburan bagi Peta dan Heiho. Badan-badan itu berisikan kaum nasionalis. Seperti

Subagio Mangunraharjo yang memimpin BP3.

Kaum priyayi yang sedang terpuruk, di zaman pendudukan Jepang merelakan anak-anak laki-laki mereka masuk PETA. Padahal di zaman Hindia Belanda banyak priyayi merasa pekerjaan tentara rendah. Militer Jepang nampaknya merubah pikiran kau tua priyayi.

Anak priyayi yang punya ijazah sekolah menengah macam MULO punya peluang besar menjadi perwira PETA. Mereka biasanya dilatih di Boei Gyugun Renseitai, di Bogor. Setelah lulus latihan 18 bulan itu, anak-anak priyayi itu akan mendapat pangkat Shodancho (komandan peleton) yang setara letnan.

Militer Jepang tak hanya melowongkan jabatan komandan peleton saja kepada orang-orang Indonesia. Pemuda terdidik dan berpengaruh juga diberi kesempatan jadi Chudancho (komandan kompi) yang setara kapten dan tokoh masyarakat berpengaruh menjadi Daidancho (komandan batalyon) yang setara mayor di PETA. Golongan yang bukan priyayi yang punya ijazah sekolah dasar tak elit biasanya hanya jadi Bundancho (komandan) regu yang setara sersan.<sup>93</sup>

Al Masih adalah satu pemuda yang menjadi calon sersan di PETA. Sebelumnya dia pegawai pegadaian di Tegal. Dia mendaftarkan dan dites kesehatannya. Setelah pelatihan, Al Masih ditempatkan sebagai sersan penembak udara. Ini bukan pengalaman militer pertamanya, karena pernah menjadi milisi penjaga kota (Stadswacht) di tahun 1942, ketika masih ada perang antara militer Belanda dengan Jepang di Jawa.<sup>94</sup>

Salah satu priyayi yang merelakan anaknya di Keresidenan Pekalongan untuk masuk PETA adalah Wijoejo Poespojoedo. Dia merekakan anaknya, Wiloejo Poespojoedo, yang berusia sekitar 23 tahun untuk mendaftar menjadi calon letnan. Priyayi lain adalah Wadyono, yang waktu Tentara Jepang datang ke Jawa sudah menjadi Camat Tanjung, Brebes. Setelah masuk PETA dia dapat pangkat setara kapten.

Untuk batalyon yang ditempatkan di Keresidenan Pekalongan, telah dipilih Raden Haji Iskandar Idris. Iskandar Idris hampir seusia dengan Kromo Lawi. Ketika Jepang datang sudah berumur 41 tahun. Iskandar Idris kelahiran Bogor 17 Februari 1901 dan pernah belajar di HIS Muhamadiyah Tegal lalu sekolah Al Irsjad dan belajar di Djamiat Chair yang terkenal di Pekalongan. Sejak 1921 dia menjadi guru bahasa Arab di Al Irsjad. Dia aktif di Muhammadiyah Pekalongan. Seperti

---

<sup>93</sup> Joyce Lebra, *Tentara Gemblengan Jepang*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1989, hlm. 118-121.

<sup>94</sup> Wawancara Anton Lucas dengan Al Masih di Pekalongan 23 Mei 1973.

juga Kromo Lawi. Sebelum bergabung di PETA, Idris pernah juga jadi agen asuransi jiwa Boemipoetra.<sup>95</sup> Perusahaan asuransi yang didirikan guru pribumi itu berusia cukup panjang.

Di zaman pendudukan Jepang, sebuah barisan yang anggotanya berstatus orang sipil juga dibentuk di Jawa. Namanya Barisan Pelopor. Dimana Kromo Lawi yang pengikut Sukarno ini dipercaya sebagai kepalanya di Keresidenan Pekalongan.

Barisan Pelopor dibentuk pada pertengahan tahun 1944 (zaman Pendudukan Djapang). Penganjur dan Pelindungnya Ir. Sukarno. Mula-mula dibentuk di Jakarta, Karesidenan-keresidenan, Kabupaten-kabupaten. Di Karesidenan Pekalongan dibentuk Barisan Pelopor Karesidenan dengan Kromo Lawi sebagai Kepala, sedang Barisan Pelopor Kota Tegal dikepalai oleh S. Tjokrosoedarmo.<sup>96</sup>

Barisan Pelopor itu tidak hanya dapat pelatihan saja, tapi juga pengawasan yang ketat pula dari militer Jepang. Ketika itu posisi Jepang makin terjepit dalam Perang Dunia II. Selain berusaha terus memperkuat dukungan rakyat Indonesia, dengan melatih pemuda dalam barisan-barisan yang bermacam-macam itu, Kempeitai bekeras pula menghabisi mata-mata atau orang pergerakan bawah tanah.

Kempeitai pernah merepotkan Kromo Lawi dkk terkait gerakan bawah tanah yang dianggap berbahaya itu. Mau tak mau, Kromo Lawi berbagi tugas kepada Sarli. Penugasan kepada Sarli itu sangatlah lucu.

Akhir Agustus 1944 saya diminta membantu Bung Lawi, supaya mencari pemuda Subario dan Saruri yang ada di daerah Pekalongan dan Tegal, karena kedua saudara itu dicari Kempeitai. Bagiku tidak ragu lagi, bahwa yang dicari adalah saya dan Bung Bagyo, karena tulisan dari Kempeitai memakai huruf katagana. Mulai saat itu tempat tinggalku lalu terpisah, dan masing-masing (Kusaeri, Sumaheru, Subagyo, Sarli) lalu menyewa tempat sendiri dan berjauhan. Selang beberapa minggu saya memberi tahu Bung Lawi, bahwa setelah kucari seditaerah Pekalongan ternyata dua pemuda (buruan Kempeitai) itu tidak ada.<sup>97</sup>

Sarli sendiri berada di Pekalongan atas saran dari Sukarno. Meski dicari-cari intel militer Jepang, Sarli dan Bagio ternyata majah jadi orang penting di Barisan Pelopor Pekalongan.

Tentu saja Barisan Pelopor punya kemampuan militer tempur yang berbeda dengan PETA. Selain barisan pelopor, barisan lain yang dibentuk di Pekolangan adalah Hizbullah. Seperti Barisan lain, sejak 1944 hingga berakhirnya Perang

<sup>95</sup> Orang Indonesia Jang Terkemoeka di Djawa, Jakarta, Gunseikan, 1944, hlm. 436.

<sup>96</sup> Muhammad Nuh, *Riwayat Perkembangan Perjuangan Barisan Pelopor di Tegal* (Manuskrip) (Koleksi Arsip Digital Anton Lucas)

<sup>97</sup> Sarli, *op. cit.*, hlm. 27

Dunia II di tahun 1945, mereka tidak dilatih menggunakan senjata api melainkan hanya dengan bambu runcing saja.<sup>98</sup>

Barisan Pelopor tentu saja berkembang. Barisan ini pernah bersama Badan Keamanan Rakyat dan Tentara Keamanan Rakyat setelah Agustus 1945. Namun tak semua anggota Barisan Pelopor menjadi anggota tentara.

Pada bulan Desember 1945, saya melepaskan dari keikut sertanya Barisan Pelopor, dan sebagai utusan Pekalongan mengunjungi kongres pertama (Barisan Pelopor) di Solo. Dalam kongres tersebut namanya dirubah menjadi Barisan Banteng, dengan pimpinan dokter Muwardi dan saudara Sudiro.<sup>99</sup>

Barisan-barisan macam Barisan Pelopor ini belakangan menjadi kekuatan penting setelah Jepang terusir. Mereka bisa berupa laskar rakyat dan ada pula yang terserap ke dalam tentara. Bambu runcing adalah senjata yang umum mereka pakai di tahun 1945 dan dengan senjata macam itulah revolusi kemudian membakari wilayah Keresidenan Pekalongan. Dimana seorang Kromo Lawi pun tak mampu membendung revolusi sosial anti priyayi tersebut.

### 3. Kerasnya Revolusi di Pekalongan

PERANG itu akhirnya berakhir pada 14 Agustus 1945, ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada tentara sekutu. Namun Tentara Jepang rupanya dijadikan tentara sekutu sebagai penjaga keamanan di beberapa tempat nusantara sambil menunggu kedatangan tentara sekutu.

Tentu saja negara macam Kerajaan Belanda tentu berkeinginan kembali ke tanah koloninya, seperti sebelum perang. Sementara itu, pemuda-pemuda yang berjejaring dengan pergerakan nasional menginginkan kemerdekaan. Dengan daya yang mereka miliki, mereka menekan golongan tua yang bekerjasama dengan Jepang untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Dibawah dorongan pemuda, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan pada 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan Timur 56, di tepatnya di teras rumah Ir Sukarno. Sementara para pendengarnya berdiri di pekarangan rumah itu. Upacara pembacaan teks Proklamasi itu begitu sederhana.

#### Dijegal Karena Revolusi

TAHUN 1945 adalah tahun penting bagi Kromo Lawi. Di awal tahun itu, untuk kesekian kalinya, dari perkawinannya dengan Raden Nganten Sukesni, Kromo Lawi mendapat seorang anak lagi.

Kamis Paing 1 Maret 1945, beberapa setelah Pemberontakan PETA Blitar 14 Februari 1945, yang dipimpin Supriyadi, telah digulung oleh tentara pendudukan Jepang, pada 1 Maret 1945 putranya yang kali ini diberinama Gempur Bambang

<sup>98</sup> Joyce Lebra, op. cit., hlm. 107.

<sup>99</sup> Sarli, op. cit., hlm. 31.

Tjahjono lahir ke dunia.<sup>100</sup> Sebelum Gempur lahir, semua anak Kromo Lawi dan Sukei, punya nama depan Setya.

Gempur baru berusia lima setengah bulan setelah minggu kedua Agustus 1945, kala itu Gempur ditinggal Kromo Lawi ke Jakarta.

Sebagai orang penting di Putera dan Jawa Hokokai juga, Kromo Lawi sering bepergian. Termasuk ke Batavia yang sudah bernama Jakarta di zaman pendudukan Jepang. Ketika Kromo Lawi berada di sana sejarah dunia sedang berubah dan sangat berpengaruh bagi kaum pergerakan kemerdekaan Indonesia.

Kala itu beredar berita kekalahan Jepang di kalangan pemuda yang kemudian memaksakan proklamasikan sesegera mungkin. Setelah penolakan maka penculikan Sukarno-Hatta dalam Peristiwa Rengasdengklok terjadi pada 16 Agustus 1945. Maka malam 16 Agustus 1945 pun diadakan sebuah rapat di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Namun sebelum penyusunan teks proklamasi Kromo Lawi sudah berjalan pulang ke Pekalongan, namun Kromo Lawi yakin proklamasi itu akan diumumkan sesegera setelah dirumuskan.

Kromo Lawi: saya pulang pada pagi harinya, pada tanggal 17 pagi, sampai di sini saya menyampaikan itu malah saya ditertawai sedikit oleh Sarimin, bekas Bupati Brebes.<sup>101</sup>

Kromo Lawi pulang dengan mengayuh sepeda Jakarta ke Pekalongan. Dalam perjalanan berita proklamasi itu dia sebarkan ke beberapa tokoh di kota-kota yang dilewatinya.<sup>102</sup>

Jadi, Kromo Lawi termasuk orang Pekalongan pertama yang tahu bahwa Indonesia sudah merdeka. Kabar gembira itu tentu tak dinikmatinya sendiri. Sebagai bagian dari kaum pergerakan nasional yang punya mimpi besar bernama kemerdekaan, kabar itu tentu dibaginya.

Pada waktu tersiarnya kabar itu saya sedang turne di pedalaman dan bertemu opsir Kempeitai Jepang yang pasti mengetahuinya, tetapi ia menyangkal keras kebenaran berita itu. Dengan sendirinya timbul kebingungan, terutama di kalangan pejabat-pejabat yang bertanggungjawab. Mereka terjepit, mengikuti gelombang pergolakan di bawah tekanan dan ancaman kekuasaan yang masih nyata.<sup>103</sup>

Sikap Sarimin cukup mewakili kebanyakan kaum priyayi yang menjadi pejabat di zaman Jepang. Hindia Belanda di masa sebelum tentu nyata bagi mereka, lalu Jepang saat itu yang nyata-nyata masih berkuasa. Sementara itu Republik Indonesia belum bisa memperlihatkan hal-hal nyata kepada mereka. Orang seperti Sarimin tentu pegawai pemerintah yang menyukai kepastian dan lebih memilih menunggu ketimbang menyatakan sikap sebagai orang merdeka.

---

<sup>100</sup> Daftar nama anak-anak Kromo Lawi yang dibuat Setyahdi Lawi di Pekalongan 7 Mei 1990 (Arsip Koleksi Dharmono Konstituanto Yoga b Kr Lawi Soemodihardjo).

<sup>101</sup> Wawancara Anton E. Lucas dengan Kromo Lawi di Pekalongan, 7 Juni 1973

<sup>102</sup> Wawancara Dharmono Konstituanto Yoga bin Kr. Lawi Soemodihardjo, Bandung, 28 Januari 2023.

<sup>103</sup> Sarimin, op. cit., hlm. 101.

Pada saat itu seorang pun tak ada yang tahu benar tentang seluk-beluk proklamasi. Tuan Kromo Lawi yang habis dari Jakarta menerangkan, bahwa Proklamasi itu belum berisi, masih berwujud ideologi, belum mempoenjai wujud yang nyata.<sup>104</sup>

Sarimin kala itu lebih percaya proklamasi Indonesia itu akan punya arti jika secara resmi pihak Jepang nyata-nyata menyerahkan kekuasaan kepada Republik Indonesia. Bupati Sarimin sangat percaya diri pada sikapnya. Dulu waktu jadi camat tanpa diminta dia mengajukan pendapatnya kepada residen kemudian dia dijadikan camat di daerah yang miskin.<sup>105</sup>

Saya ditertawai Sarimin itu di rumah yang sebelah sini CPM, kita kumpul di sana dengan beberapa bupati, kemudian saya ceritakan tentang proklamasi itu. Nah, ditertawai, karena ya, yang bisa memerdekakan kita itu adalah negara yang menang anggapan dari Sarimin cs itu, sehingga dia tidak kita ini bisa merdeka, harus yang percaya kalau umpamanya saya... memerdekakan adalah, ya, yang menang pada waktu itu adalah Amerika. Sebab Jepang sudah jatuh, dan Jepang tidak bisa memberi kita hak kemerdekaan.<sup>106</sup>

Lain Sarli tentu saja lain Sarimin. Sarli, orang dekat Kromo Lawi mendengarkan berita kemerdekaan itu. Ini berkat pemuda-pemuda yang bekerja di stasiun radio yang dikuasai militer Jepang.

Sarli adalah pendengar radio. Dia tak melewatkan berita radio di masa-masa sebelum dan menyerahnya Jepang. Dia bahkan tak sendirian dalam memantau siaran radio. Setidaknya dia punya empat kawan.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 siaran siang hari, saat kami berlima mendengarkan radio sambil bersendagurau, menjadi terkejut karena ada penyiar mengatakan: Proklamasi kami bangsa Indonesia .... Dengan ini mengatakan kemerdekaann... atas nama bangsa Indonesia... Sukarno-Hatta. Saya tertegun lama, dan tidak dapat berbicara [...] Siang itu juga saya lalu memberi tahukan kepada Bung Bagyo, Kusaheri dan Bung Lawi.<sup>107</sup>

Sarli tidak hanya terpaku pada berita siang itu. Bersama kawan-kawannya dia juga memantau lagi berita-berita di radio pada sore harinya. Benar saja mereka mendengar lagi berita proklamasih seperti yang mereka dengar pada siang hari tadi.

---

<sup>104</sup> Keterangan Sarimin Proc Gem, Invt. File 201 1946.

<sup>105</sup> Anton Lucas, op. cit., hlm. 96.

<sup>106</sup> Wawancara Anton E. Lucas dengan Kromo Lawi di Pekalongan, 7 Juni 1973.

<sup>107</sup> Sarli, op. cit., hlm. 28.

Berita itu lalu mereka kabarkan kepada kawan-kawan mereka lagi. Begitu pun esok harinya.

Kala itu radio adalah media tercepat dalam bidang komunikasi. Melebihi kecepatan surat kabar tentunya. Sekitar kemerdekaan Indonesia, radio adalah senjata kaum pergerakan yang sangat penting dalam revolusi. Tanpa radio yang mengabarkan kekalahan Jepang dan kemerdekaan Indonesia, bambu runcing masihlah sebuah tanaman semata.

Keterbatasan membuat banyak orang Indonesia memakai bambu runcing. Keterbatasan senjata itu membuat para pemakai bambu runcing menguatkan dirinya dengan tuah atau jimat dari yang dianggap orang sakti. Di masa itu banyak haji atau kyai yang dianggap sakti.

Tak hanya di Pekalongan saja, bahkan ada yang rela minta “disembur” dengan tuah atau kesaktian bambu runcingnya itu sampai harus pergi ke Parakan, Temanggung. Bahkan ada pemakai bambu runcing yang rela merogoh koceknya dari Rp 100 hingga ribuan rupiah. Tak hanya Bambu Runcing, ada juga yang pentung atau klewangnya minta “disembur” agar sakti.<sup>108</sup>

Berita proklamasi membuat orang macam Kromo Lawi atau Sarli termasuk orang sibuk setelah berita proklamasi berkumandang setelah 17 Agustus 1945. Begitu juga pengikut mereka di Barisan Pelopor.

Pada pagi hari tanggal 18 Agustus jam 6.30, saya dengan saudara Suwanto dan Saleh pergi ke kantor Balai Kota, bersama saudara Suwarta kami ke kantor balai kota (gemeente) Pekalongan dan terus mengganti bendera Jepang (Hinomaru) dengan bendera Merah-Putih. Perubahan bendera tersebut menjadikan pertanyaan semua pegawai balai kota, dan sekitar 08.15 dipanggil Walikota Sumpeno.<sup>109</sup>

Sarli bertemu Walikota Sumpeno dan beberapa pejabat di kantor walikota. Sarli diminta menurunkan bendera merah putih dengan alasan karena menurut para birokrat itu belum adanya penyerahan kekuasaan secara resmi. Sarli menolak hal tersebut karena bagi Sarli dengan adanya berita proklamasi. Bagi Sarli Jepang tidak lagi berkuasa. Sarli kemudian memilih pergi dari pertemuan tersebut.

Setelah Kromo Lawi tiba di Pekalongan, setelah berita proklamasi 17 Agustus 1945 tersebar, maka bersama pemuda-pemuda yang kala itu di sekitarnya, dia mulai mengibarkan bendera merah putih di kantor pers. Sebuah bendera juga berkibar di stasiun kereta api Pekalongan, dengan tiang yang tinggi.

Itu Mumpuni punya kerja, itu Mumpuni punya kerja, itu Mumpuni terus dia apa namanya, memerintahkan. Sebab Mumpuni adalah bagian pembangunan dari pada (jawatan) kereta api. Dia lantas memerintahkan untuk membangun dan dia pada waktu itu menguasai buruh kereta api.<sup>110</sup>

<sup>108</sup> Wawancara Anton E. Lucas dengan Kromo Lawi di Pekalongan, 7 Juni 1973.

<sup>109</sup> Sarli, op. cit., hlm. 30.

<sup>110</sup> Wawancara Anton E. Lucas dengan Kromo Lawi di Pekalongan, 7 Juni 1973.

Kelompok pemuda kereta api tergolong menonjol di Pekalongan pada awal-awal revolusi kemerdekaan tersebut. Mereka suka memastikan apakah penumpang kereta api sudah memakai lencana merah putih atau belum.<sup>111</sup>

Setelah bulan Agustus 1945, Kromo Lawi termasuk salah satu anggota Komite Nasional Indonesia (KNI) di Pekalongan. KNI adalah badan parlemen di awal kemerdekaan. Ini pertama kalinya Kromo Lawi menjadi anggota parlemen, yang kini semacam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pengibar bendera kala itu bisa jadi orang bermasalah sebab tentara Jepang tidak menyukainya. Kromo Lawi termasuk orang yang hendak dimintai pertanggungjawaban oleh birokrat yang masih merasa Jepang masih berkuasa dan harus dihormati. Kromo Lawi lalu dibawa ke kantor polisi dengan ditutup matanya.

Kemudian Shu Cho Kan (residen Jepang) itu terus memerintahkan kepada Meester besar atau itu kemauannya sendiri, besar itu yang memerintahkan menurunkan bendera merah putih, itulah sebabnya sampai saya pada waktu besar diusulkan untuk menjadi Residen Pekalongan (versi RI) saya menolak karena saya tahu bahwa perintah menurunkan bendera Merah Putih itu adalah besar.<sup>112</sup>

Mr Besar Martokusumo mengaku tidak merasa memerintahkan penangkapan Kromo Lawi. Besar punya penilaian tersendiri tentang Kromo Lawi. Dibanding Pemalang dan Tegal, Pekalongan ada hari tidak ada dua bendera Jepang maupun merah putih tidak berkibar di depan kantor keresidenan.

Bagi Kromo Lawi, di hadapan Mr Besar dirinya hanyalah seorang kolaborator Jepang yang harus dipinggirkan pada saatnya. Bagi Kromo Lawi dia punya alasan untuk bekerjasama dengan tentara Jepang, karena dia lakukan itu untuk kepentingan bersama.

Mr Besar tampak ingin berhati-hati kepada tentara Jepang yang bisa menembaknya kapan saja. Besar juga memperlihatkan betapa berhati-hatinya kepada Kromo Lawi yang menurutnya bisa mengobarkan perlawanan terhadap tentara Jepang yang bisa memakan banyak korban.

Mr Besar: Kromo Lawi itu orang baik, akan tetapi dia PNI ya. Selamanya mau keras saja, saya orang tua [...] Dia sama kawan-kawannya berpakaian hitam, itu dengan maksud membakar gedung Kempeitai. Ha saya kalau membakar saya tidak setuju sekali.<sup>113</sup>

Ada keinginan para pemuda untuk merebut senjata dengan jalan kekerasan. Sementara itu Kromo Lawi, Maas dan Mohamad Syafei menginginkan cara damai.

<sup>111</sup> Anton Lucas, op. cit., hlm. 102.

<sup>112</sup> Wawancara Anton E. Lucas dengan Kromo Lawi di Pekalongan, 7 Juni 1973.

<sup>113</sup> Wawancara Anton E. Lucas dengan Mr Mohamad Besar di Jakarta, 24 Juli 1973.

Para pemuda itu sebenarnya sudah siap dan hanya ingin menunggu komando saja. Pentolan dari pemuda itu adalah seseorang bernama Mumpuni.

Hanya menunggu instruksi. Tapi pemuda tidak sabar dan ingin terus menyerbu saja, walaupun ya kita belum mempunyai senjata itu yang saya keberatan untuk menghadapi senjata dengan tidak bersenjata, maka lantas saya menyusun pada malam harinya, untuk kita menyerbu pada malam hari. Tapi usaha saya digagalkan karena komando yang sudah saya atur demikian rupa untuk bisa maju serentak ke Kempeitai itu dirusak oleh (Residen) Besar pada waktu itu.<sup>114</sup>

Rencananya mereka akan menyerang kantor Kempeitai dari segala penjuru. Rencana Kromo Lawi dan pemuda-pemuda tadi bubar. Dia ditahan ketika mendatangi desa-desa untuk mengatur barisan-barisan pemuda yang akan menyerang. Kelompok yang menangkap Kromo Lawi justru bersalah dari kelompok Pesindo, yang dipimpin anak dari dr Soemarno, yang juga keponakan Mr Besar.

Ketika Kromo Lawi dalam tahanan, pada tanggal 3 Oktober 1945, para pemuda menyerbu markas Kempeitai di bekas Hotel Jawa. Seperti biasa, mereka yang terlatih cenderung mampu menghadapi yang tidak terlatih, meski kalah jumlah.

Pihak Jepang memusatkan kekuatan di kawasan Pasar Ratu. Disanalah, di pinggir lapangan, terletak Kantor Residen. Dan di sana juga Kantor Kempeitai (ex. Hotel Java). Serdadu-serdadu Jepang bertahan di sana karena merasa dikepung dari semua penjuru!<sup>115</sup>

Hoengeng mendapat cerita sekitar pertempuran itu dari Meriati binti dr Soemakno, yang belakangan jadi istrinya dan dikenal sebagai Merry Hoengeng. Tentara Jepang yang merasa dalam bahaya itu tentu dalam posisi siap tembak. Nyawa mereka tentu merasa terancam. Gambaran umum pertempuran, kini masih tercatat di monumen 3 Oktober Pekalongan:

Ribuan rakyat berkerumun di depan markas Kempeitai. Pasukan Jepang siap siaga dengan senapan mesinnya. Saat itu tiga pemuda naik ke pojok sebelah kiri, hendak menurunkan bendera Jepang, di gedung markas Kempeitai, kemudian Jepang mulai menembaki kerumunan rakyat.<sup>116</sup>

Tentu saja banyak korban dari orang Indonesia bergelimpangan. Merry ikut menjadi Palang Merah di sana. Para pemuda itu jelas nekad karena hanya

---

<sup>114</sup> Wawancara Anton E. Lucas dengan Kromo Lawi di Pekalongan, 7 Juni 1973.

<sup>115</sup> Hoengeng Imam Santosa dkk, Hoengeng Polisi Idaman dan Kenyataaan, Jakarta, Sinar Harapan, 1993, hlm. 126.

<sup>116</sup> Catatan ini bersumber dari Anton Lucas, op. cit., hlm 124-126.

memakai bambu runcing. Para serdadu Jepang juga ada yang berjaga di kantor wedana.

Hoegeng Imam Santoso: Diceritakan kepada saya bahu bermacam-macam lasykar memasuki kota Pekalongan dari berbagai penjuru. Mereka datang untuk mengambilalih atau melucuti persenjataan Kenpeitai (Polisi Militer) Jepang. Memang itulah yang dilakukan lasykar-lasykar tersebut pertama-tama.<sup>117</sup>

Dalam pertempuran mengepung Kempeitai itu, di kalangan pendukung Republik Indonesia terdapat 35 orang yang terbunuh. Sebagai pihak yang unggul secara militer, hanya 7 orang meninggal dari pihak tentara Jepang. Meski begitu, mau tak mau pihak tentara Jepang akhirnya mau berunding dengan pihak Republik.

Pada tanggal 4 Oktober 1945 sebenarnya sudah ada perundingan yang hasilnya Kempeitai akan menyerahkan senjatanya kepada polisi Republik Indonesia. Kala itu Mr Besar mewakili pihak Republik Indonesia. Nantinya senjata-senjata itu akan disimpan di bekas gedung Societeit Pekalongan, namun sebuah insiden terjadi.

Sudjono: Terjadilah keributan diantara orang-orang Jepang. Saya melihat tiga orang Jepang ditikam dan dibunuh dengan bambu runcing... Sambil berlindung dibawah sebuah jendela saya melihat Mr besar meloncati tembok. Peluru berhamburan kemana-mana, dengan mudah dapat membunuhnya... saya melihat seorang pemuda berada di atas atap gedung Kempeitai membawa minyak tanah dan berusaha membakarnya; darah telah mengalir dari luka di kepalanya... orang-orang Jepang itu menembak tanpa tujuan ke siapapun...<sup>118</sup>

Pihak tentara Jepang akhirnya mau keluar dari kota Pekalongan dan menuju Purwokerto. Mereka meninggalkan Pekalongan tanpa senjata pada 7 Oktober 1945 dan Republik Indonesia pun bisa tegak dengan leluasa di kota Pekalongan. Kromo Lawi tak bisa ikut terlibat Pertempuran 3 Oktober 1945 di Pekalongan itu. Pertempuran itu berlangsung tiga hari.

Kromo Lawi baru dibebaskan setelah kedatangan Sayuti Melik dari Semarang mewakili Gubernur Jawa Tengah Mr Wongsonegoro dan jabatan Residen Pekalongan tidak lagi dipegang oleh Mr Besar, melainkan sudah dipegang Suprpto, yang bekas Jaksa.

### **Emosi Rakyat Banyak Yang Tak Terbendung**

HANYA revolusi yang kacau sajalah yang bisa dimiliki rakyat banyak Indonesia. Zaman normal bahkan zaman pembangunan, mereka tidak bisa memiliki atau

<sup>117</sup> Hoegeng Imam Santosa dkk, op.cit., hlm. 126.

<sup>118</sup> Wawancara Anton Lucas dengan Sudjono, tanggal 29 Juli 1973.

mendapat apa-apa. Dalam revolusi, yang ditakuti banyak orang birokrat yang berkuasa, rakyat banyak bisa berperan lebih.

Setelah terjadinya proklamasi, kelaparan dan kekuarangan dialami rakyat yang selama penjajahan Jepang tidaklah menjadi lebih ringan. Bertan-ton padi yang disetorkan sehabis panen (Mei-Juni 1945) di Tiga Daerah menumpuk di Gudang-gudang. Tuntutan rakyat desa agar padi itu dibagikan, sama sekali tidak ditanggapi oleh paming praja atau camat.<sup>119</sup>

Amarah massa rakyat yang lapar itu tentu saja lahir berkat sikap para pejabat daerah itu. Jelang Oktober 1945 padi-padi itu tak juga dibagikan kepada rakyat yang sudah terlanjur marah. Hingga tak hanya revolusi kemerdekaan Indonesia saja yang terjadi tapi sebuah revolusi sosial di daerah keresidenan Pekalongan. Menurut Anton Lucas revolusi sosial itu dimulai di Desa Cerih, pada 7 Oktober 1945 malam. Lurahnya Harjowijono segera dikepung rumahnya.

Rakyat banyak mengancam akan membakar rumahnya jika tidak keluarganya. Paginya, lurah keluar. Rakyat yang mengepung out lalu menyuruhnya pakai pakaian karung goni dan istrinya disuruh pakai sarung padi. Kemudian pasangan lurah itu diarak keliling kampung dengan iringan gamelan. Apa yang terjadi di Cerih itu terjadi di daerah-daerah lain di kabupaten Pemalang dan Tegal. Ketika revolusi sosial itu dimulai, Kromo Lawi masih dalam tahanan.

Ben Anderson: Peristiwa demi peristiwa pun bergerak semakin cepat. Pada akhir bulan (November 1945) seluruh pangrehpraja tingkat atas di Brebes telah ditahan bersama keluarga mereka, dan seorang bupati baru pilihan rakyat, Kyai Satan memulai tugasnya.<sup>120</sup>

Rupanya, Kaum revolusioner itu menurut Hoengeng sudah menyusun dalam perebutan senjata dari Kempeitai pada 3 Oktober 1945. Kala itu amarah dan emosi rakyat banyak diarahkan kepada tentara Jepang saja. Setelahnya ada sasaran lain pun dikejar.

Hoengeng Imam Santoso: Selain mengirimkan pasukan bambu runcing untuk menyerang serdadu-serdadu Jepang bersenjata api, para pemberontak juga menyusupkan orang-orangnya ke Pekalongan untuk mengambilalih pemerintahan! Salah seorang pemberontak itu adalah seorang jaksa bekas anak buah ayah saya yang bernama Maksoem. Maksoem malah menginap di rumah ayah. Barulah kemudian diketahui, bahwa Maksoem datang dengan rencana jahat untuk mengambilalih kedudukan ayah sebagai Kepala Kantor

---

<sup>119</sup> Anton Lucas, op. cit., hlm. 141.

<sup>120</sup> Ben Anderson, *Revoloesi Pemoeda Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*, Serpong, Marjin Kiri, hlm. 397.

Kejaksanaan dan, siapa tahu, juga untuk ayah menghabisi nyawa ayah saya.<sup>121</sup>

Sedari zaman Jepang, Hoegeng Imam Santosa tidak tinggal di Pekalongan untuk menjalani karirnya sebagai polisi. Ketika revolusi meletus di Keresidenan Pekalongan, Hoegeng sedang berada di Semarang. Ayah Hoegeng berasal dari Tegal dan Ibu yang berasal dari Pemalang.

Keluarganya, karena ayahnya adalah pegawai kolonial juga seperti banyak priyayi lain, tentu terancam oleh revolusi sosial yang kemudian dikenal sebagai Revolusi Tiga Daerah. Untung saja revolusi sosial tidak membakar Pekalongan, namun terjadi di Tegal, Brebes dan Pemalang. Daerah-daerah ini dikenal sebagai Tiga Daerah.

Katanya kelompok revolusi tiga daerah itu hendak mendirikan sebuah pemerintahan sendiri. Kelompok itu, bersama golongan yang disebut komunis oleh sebagian orang. Barangkali tuduhan itu karena diantara para orang penting dalam Tiga Daerah itu adalah bekas orang buangan di Boven Digoel yang disebut Dugulis. Dugulis kerap diidentikan sebagai komunis, meski kenyataannya tidak selalu.

Jadi dulu mereka tidak menyebutkan komunismenya, tapi mereka dulu menyebutkan sosialisnya, tidak menonjolkan istilah komunismenya, tapi sosialismenya, itu lebih dikemukakan tiga daerah, karena tiga daerah itu dulunya banyak dipengaruhi oleh perjuangan Amir Sjarifuddin belum sampai kepada perjuangannya Musso, belum, sebab Musso belum datang, Musso datang tahun 1948.<sup>122</sup>

Bagian-bagian dari revolusi tiga daerah itu lalu bersatu dalam Gabungan Badan Perjuangan Rakyat Tiga Daerah (GBP3D). sekiar pertengahan November 1945. Gerakan kerakyatan yang marah itu memilih pemimpinnya sendiri yang berasal dari kalangan non priyayi. Pemimpin GBP3D sendiri adalah Soekirman dan Soewignjo.

Di daerah Talang, setersebutlah seorang tukang cukur yang biasa dipanggil Kutil. Dia tampak bukan siapa-siapa di zaman normal HIndia Belanda dan di zaman pendudukan Jepang.

Anton Lucas: Kutil nama aslinya adalah Sachjani. Kutil dalam bahasa Jawa berarti bintil kecil atau bisa diartikan pencopet. Namanya disesuaikan dengan raut mukanya berbintil-bintil warna hitam. Sewaktu dia kecil memang bukannya berbintil-bintil, namun sesudah dewasa bintil-bintil itu hilang, tetapi nama itu tetap melekat padanya.<sup>123</sup>

<sup>121</sup> Hoegeng Imam Santosa dkk, op.cit., hlm. 128.

<sup>122</sup> Wawancara Anton E. Lucas dengan Kromo Lawi di Pekalongan, 7 Juni 1973.

<sup>123</sup> Anton Lucas, op. cit., hlm. 146.

Kutil di awal kemerdekaan membentuk Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI) yang bermarkas di gedung bekas Bank Rakyat Talang. Dia memiliki banyak pengikut. Sentimen anti Nederlands Indie Civil Administrations (NICA) sangat kuat di sana. Selain mencari NICA mereka juga mencari sisa-sisa serdadu Jepang.

Pengikut-pengikut Kutil umumnya orang-orang yang dibakar emosi terhadap orang-orang yang dianggap pernah bekerja kepada tentara Jepang maupun pemerintah kolonial. Dalam Peristiwa Tiga daerah itu banyak orang-orang yang dianggap musuh rakyat karena bekerja kepada Jepang maupun Belanda menjadi korban pembunuhan. Diantara yang terbunuh antara lain Camat Adiwerna, yang dibunuh lantaran dinilai tidak adil dalam penangkapan pada para pedagang maupun dalam hal menyita barang.

Kutil berusaha bersikap Sama Rata Sama Rasa. Dia mau semua kekayaan dibagikan ke semua orang. Ini yang membuat Kutil dan gerakan Tiga Daerah itu dianggap sebagai gerakan komunis. Kutil dan pengikutnya yang menggeser bupati lama kemudian mengangkat Kyai Haji Abu Syujai.

Gerakan Tiga Daerah itu lalu menjadi masalah bagi pemerintah Republik Indonesia di Jawa Tengah. Hingga Gubernur Jawa Tengah, Mr Wongsonegoro mengirim wakil gubernur Sayuti Melik ke daerah keresidenan Pekalongan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Hoegeng Imam Santosa: Sepintas lalu hanya sekitar suara-suara pro dan kontra pengangkatan para pejabat lokal RI di sana. Misalnya pro dan kontra pengangkatan Mr. Besar Martokusumo sebagai Residen Pekalongan. Namun persoalan sebenarnya lebih mendalam, yang kemudian meledak dalam kasus "Revolusi Sosial Tiga Daerah", di Kabupaten Brebes, Tegal dan Pemalang.<sup>124</sup>

Massa rakyat itu tidak menginginkan pemimpin atau pejabat yang terkait dengan Jepang dan Hindia Belanda. Tentu sulit mencari birokrat baru yang tidak terkait Jepang atau Hindia Belanda. Setelah Mr Besar digantikan Soeprapto, Kromo Lawi dibebaskan. Sayuti Melik adalah orang yang menganjurkan pembebasan Kromo Lawi. Dan Sayuti Melik sang pengetik naskah proklamasi itu berhasil melakukannya.<sup>125</sup>

Pembebasannya tidaklah membuatnya langsung beristirahat. Kromo Lawi diperintahkan oleh Jaksa Soeprapto dan Sayuti Melik untuk bisa mengamankan daerah-daerah yang sedang mengalami pergolakan revolusi sosial. Sebagai anggota KNI Daerah Pekalongan dia dianggap orang yang harus membantu menegakkan kuasa Republik Indonesia di keresidenan Pekalongan.

Kromo Lawi: Saya pergi dengan kendaraan yang saya ambil dari Sragi ke Pemalan, tapi kemudian sampai di Pemalang saya itu di sana

<sup>124</sup> Hoegeng Imam Santosa dkk, Hoegeng Polisi Idaman dan Kenyataaan, Jakarta, Sinar Harapan, 1993, hlm. 125.

<sup>125</sup> Sayuti Melik, Wawancara dengan Sayuti Melik, Jakarta, CSIS, 1986, hlm. 261.

dianggap kebetulan saya di Pemalang ditangkap oleh Tiga Daerah. Di rumah saudara Soepangat, yang mengawal saya yaitu Urip dan Supardi, dari Pemalang terus saya dibawa ke Randudongkal, karena mendengar bahwa BKR akan datang di Pemalang, maka saya itu dibawa ke Randudongkal, di Randudongkal itu saya ditawan dan harus makan sendiri, tapi saya harus makan sendiri, saya beli makanan sendiri.<sup>126</sup>

Bagi Kromo Lawi, kelompok Tiga Daerah itu bertentangan dengan pemerintah baru Republik Indonesia dan tidak segaris dengan ideologi nasional. Meski Kromo Lawi sendiri punya sedikit simpati pada Gerakan Tiga Daerah. Sebab di sisi lain punya niatan membela rakyat banyak yang menderita karena hajat hidupnya dikuasai kaum priyayi birokrat yang enggan dengan segera membagikan bahan makanan.

Penahanan Kromo Lawi di Tegal oleh TKR melambangkan simpang siurnya politik lokal selama Peristiwa Tiga Daerah. Kromo Lawi sebagai seorang pengikut Sukarno yang paling terkemuka di keresidenan itu menjadi pemimpin Putera dan Jawa Hokokai semasa penduduk an. Ia dituduh sebagai agen Jepang sewaktu terjadi clash dengan kenpeitai Pekalongan pada awal Oktober, dan pernah ditahan oleh pemuda pendukung Residen Besar, walaupun ia seorang anggota KNI Pekalongan.<sup>127</sup>

Di Randudongkal, Kromo Lawi ditahan di rumah Haji Zaini. Dari sana, Kromo Lawi lalu dibawa ke Slawi melalui jalur selatan. Di Slawi, Kromo Lawi ditahan di Dukuh Turi. Di sana Kromo Lawi bertemu dengan Iskandar Indris, komandan BRK TKR daerah Pekalongan. Ketika datang TKR ke daerah itu, hanya Iskandar Idris saja yang dibebaskan TKR. Sementara Kromo Lawi dibiarkan meringkuk dalam tahanan karena TKR meyakini bahwa Kromo Lawi bagian dari Kelompok Tiga Daerah. Dari Slawi, Kromo Lawi kemudian dibawa ke Tegal.

Kromo Lawi: Setelah tidak mengalami pemeriksaan, pada Peristiwa 3 Juli itu saya dibawa ke Yogya, karena dituduh saya ini ada hubungan dengan Yamin, sebab Yamin dituduh mengadakan kup bersama-sama Jenderal Dharsono [...] dan di Yogya terus saya ditahan antara ahmpir-hampir satu tahun..<sup>128</sup>

Pemenjaraan Kromo Lawi yang lama itu tidaklah melalui proses pengadilan yang wajar. Kromo Lawi bahkan hampir terancam hukuman mati seperti Kutil. Padahal dia malah ditahan oleh para pengikut Kelompok Tiga Daerah.

---

<sup>126</sup> Wawancara Anton E. Lucas dengan Kromo Lawi di Pekalongan, 7 Juni 1973.

<sup>127</sup> Anton Lucas, op. cit, hlm. 270.

<sup>128</sup> Wawancara Anton E. Lucas dengan Kromo Lawi di Pekalongan, 7 Juni 1973.

Pak Domo (Laksamana Sudomo) mengabari Om saya. Kalau Bapak itu mau dieksekusi. Om saya lari ke Istana (Gedung Agung Yogyakarta). Ke Bung Karno. Gak tahu apa hasilnya, lalu lari ke Bung Hatta. Bung Hatta menolong waktu itu. Bapak saya termasuk yang direhabilitasi.<sup>129</sup>

Maka Kromo Lawi pun tetap hidup. Dia kemudian dibebaskan namun tetap berdiri di belakang Republik Indonesia meskipun telah mengalami penyingkiran dari sejarah dengan penahanannya sejak Oktober 1945. Hingga awal Januari tahun 1947 Kromo Lawi kembali memimpin barisannya, yakni dari Barisan Banteng.

### **Bergerilya Bersama Banteng**

TERSEBUTLAH di zaman Jepang, di Pekalongan hiduplah seorang pemuda asal Blora. Namanya Ali Moertopo. Dia ikut pamannya berdagang di Pekalongan. Pemuda ini cukup bagus pendidikannya, karena pernah sekolah di MULO.

Di tahun 1945, Ali Moertopo belumlah dikenal. Kecuali jika dia anggota Hizbullah dan Resimen ke-17 di Pekalongan.

Wadyono pada 1992: Pernah Ali Moertopo pada pertemuan reuni mantan anggota Resimen 17 di Pekalongan tahun 1980an mengatakan bahwa waktu Belanda masuk Pekalongan, aksio polisonil pertama, ia tidak lari ke luar kota, tapi berjuang melawan Belanda di dalam kota. Hal itu dia ceritakan dengan bangga. Waktu itu dia sudah Menteri Penerangan. [...] Tetapi belakangan ini, sesudah Ali almarhum, ada bekas anak buah saya yang menghubungi saya dan mengatakan bahwa Ali waktu itu menjadi anggota NEFIS. Bahkan kemudian waktu Belanda mundur dia ditangkap anak buah saya, lalu dibawa ke Wiradesa akan dibunuh. Tapi tidak jadi.<sup>130</sup>

Jauh setelah revolusi, Ali Moertopo berkawan dekat dengan Juned, seorang pengusaha asal Pekalongan yang dulu memumpin Pesindo.

Wadyono pada 1977: Yang terang sekali Ali tidak pernah menjadi anggota Pesindonya Juned. [...] Lepas dari sejarahnya yang tidak begitu menonjol, tetapi sekarang Ali dapat membuktikan dirinya sebagai tokoh yang brilian dan memiliki IQ yang tinggi.<sup>131</sup>

---

<sup>129</sup> Wawancara Dharmono Konstituanto Yoga bin Kr. Lawi Soemodihardjo, Jakarta, 3 Januari 2023.

<sup>130</sup> Surat Wadyono kepada Anton Lucas tanggal 29 Mei 1992 (Arsip Koleksi Anton Lucas)

<sup>131</sup> Surat Wadyono kepada Anton Lucas tanggal 22 September 1977 (Arsip Koleksi Anton Lucas)

Tiga dekade kemudian, Ali memang bukan sekedar serdadu biasa, dia adalah seorang jenderal berpengaruh, meski dia bukan pemimpin puncak ketentaraan. Ali Moertopo adalah Mayor Jenderal di tahun 1974 dan sebelumnya adalah Staf Pribadi Presiden RI Jenderal Soeharto dan Kepala bagian II Badan Kordinasi Intelijen (BAKIN). Setelah revolusi Indonesia berlalu, Ali Moertopo pernah menjadi komandan kompi batalyon 431 Banteng Raiders.<sup>132</sup> Sebagai Hizbullah, Ali Mertopo dekat dengan kelompok agama.

Seperti di daerah lain, pemuda tetap menjadi kekuatan penting dalam revolusi. Sekitar revolusi 1945, setidaknya ada tiga kelompok pemuda di Pekalongan.

Ada tiga grup yaitu grup Sosialis Kanan, Grup Agama Islam, grup nasionalis. Kalau grup nasionalis itu bernaung dibawah panji Banteng, Barisan Banteng, grup sosialis itu bernaung dibawah panjinya Juned. [...] Grup Islam itu berbaung dibawah panjinya Haji Ikhsan.<sup>133</sup>

Golongan Sosialis yang dimaksud adalah Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo). Juned dulunya adalah orang di sebuah kampung yang kini bernama Pesindon dan Juned dikenal sebagai seorang pengusaha baitk yang kaya raya.<sup>134</sup> Kampung ini dikenal sebagai kampung batik. Juned sendiri tidak jauh dari markas Kempetai Jepang di Pekalongan.

Sebelum di Pesindo, Juned adalah pemimpin dari Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI). AMRI kemudian tergabung ke dalam Pesindo.

Pesindo dianggap sebagai organisasi yang paling kuat di Pekalongan. Menurut Kromo Lawi Pesindo itu dekat dengan ini, kaum-kaum elit, elit, kaum Banteng itu adalah dari massa, sehingga Benteng itu lebih menguasai. Di banding Pesindo, Barisan Banteng lebih banyak memimpin dalam hal bergerak melawan. Kromo Lawi melihat ada perbedaan antara kelompoknya dengan kelompok Islam di Pekalongan.

Mereka itu mempertahankan Islamnya saja, itu Sabilillah dan Hizbullah apa itu yang nampak sedikit ada kekuatan ya Hizbullah, karena Hizbullah itu adalah dari yang dinamai Hizbul Wathon. [...] tapi kalau Sabilillah itu adalah temporer, itu hanya ada pada waktu di sini masih ada Kyai Sirod, sesudah Kyai Sirad itu ndak ada, ya habis ndak ada.<sup>135</sup>

Kromo Lawi tentu berkiblat kepada pusat Republik Indonesia di Yogyakarta. Dia tentu merasa perpanjangan tangan dari Sukarno. Kromo Lawi lalu

<sup>132</sup> Harsya Bachtiar, *Siapa Dia Perwira Tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat*, Jakarta, Djambatan, 1988, hlm. 210.

<sup>133</sup> Wawancara Anton E. Lucas dengan Kromo Lawi di Pekalongan, 7 Juni 1973.

<sup>134</sup> Wawancara Dharmono Konstituanto Yoga bin Lawi Soemodihardjo, Pekalongan 20 Mei 2023.

<sup>135</sup> Wawancara Anton E. Lucas dengan Kromo Lawi di Pekalongan, 7 Juni 1973.

menjadi bagian dari Biro Perjuangan.<sup>136</sup> Pemimpin biro itu adalah Jenderal Mayor Djokosujono, yang dekat dengan Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin. Kromo Lawi tentu orang penting di biro ini di daerah Pekalongan.

(Biro Perjuangan) pusatnya di Tegal, inspektoratnya itu di Tegal, jadi Biro Perjuangan itu adalah suatu biro yang mengatur perjuangan-perjuangan pada waktu itu, yang membiayai PKI, yang membiayai gerakan-gerakan lain-lain dan kelaskaran-kelaskaran, jadi itu kita mendapat bantuan dan biaya untuk keperluan peralatan daripada perjuangan. Ha jadi PNI itu hanya politis, kalau kita sampai pada taktis dan operasional maka kita berjuang pemuda dengan pemuda kita yang dinamai Barisan Benteng.<sup>137</sup>

Kerja biro ini tidaklah ringan. Mereka harus menghadapi tentara Belanda yang pada pertengahan 1947 sudah siap menusuk wilayah Republik Indonesia. Tentara Belanda melancarkan Agresi Militer pertama sejak 21 Juli 1947, dimana daerah-daerah yang dikenal sebagai daerah pekebunan direbuti Belanda. Terlibat motif ekonomis sangat besar dari pihak Belanda.

Menghadapi tentara modern milik Belanda tentu bukan hal mudah untuk tentara maupun laskar yang dipimpin Kromo Lawi. Tak heran jika kekuatan Republik memilih mundur daripada hancur sia-sia.

Kromo Lawi sendiri lalu memimpin gerilya di daerah dataran tinggi Dieng.<sup>138</sup> Sebagai orang yang sejak muda dalam pergerakan nasional, Kromo Lawi suka membangun jaringan hingga ke daerah pelosok sekitar Dieng.<sup>139</sup> Di sana Kromo Lawi menjalin kerjasama dengan tentara Republik Indonesia,

Ya setelah di sini tidak bisa dipertahankan bersama-sama dengan Resimen (17) itu terus mundur, saya bekerja sama dengan resimen, jadi karena saya menjadi pemimpin Barisan Benteng yang meliputi apa namanya, kelaskaran yang besar, jadi saya lantas dengan resimen.  
140

Dengan susah payah, rintangan dari Resimen 17 yang dipimpin Letnan Kolonel Wadyono akhirnya bisa ditembus tentara Belanda. Komandan tentara Belanda dalam operasi menembus keresidenan Pekalongan itu adalah Kolonel Jan Meijer. Mereka tidak bisa merebut Pekalongan dengan cepat. Setelah menginap semalam baru mereka bergerak ke Pekalongan, yang sudah kosong dari kekuatan

<sup>136</sup> Anton Lucas, op. cit., hlm. 328.

<sup>137</sup> Wawancara Anton E. Lucas dengan Kromo Lawi di Pekalongan, 7 Juni 1973.

<sup>138</sup> Anton Lucas, op. cit., hlm. 328.

<sup>139</sup> Wawancara Dharmono Konstituanto Yoga bin Kr. Lawi Soemodihardjo, Pekalongan 20 Januari 2023.

<sup>140</sup> Wawancara Anton E. Lucas dengan Kromo Lawi di Pekalongan, 7 Juni 1973.

Republik. Tentara Belanda lalu berusaha bergerak ke arah selatan setelah memasuki daerah Pekalongan.<sup>141</sup>

Kromo Lawi sendiri berada di tenggara dari Pekalongan dan bergerak melawan tentara Belanda. Kromo Lawi membantu tentara di Kejajar, daerah Wonosobo. Di sana dia sempat menjalankan sebuah sekolah.

Meski dalam posisi bertahan di daerah pegunungan. Daerah pegunungan biasanya sulit dimasuki tentara Belanda. Terbatasnya jumlah tentara Belanda membuat mereka hanya fokus pada daerah perkotaan.

Dengan tentara, Kromo Lawi berusaha saling menjaga perasaan dengan dan tidak bergerak sendiri-sendiri atau membayangi satu sama lain. Kromo Lawi tampak berusaha menjadi rekan seperjuangan yang baik, dalam rangka menghadapi tentara Belanda yang kuat di daerah pesisir pantai utara Jawa Tengah.

Barisan Banteng itu adalah lebih dekat dengan tentara, karena sesuatunya yang kita kerjakan kita gerakan, kita apa saja yang akan saya kerjakan itu tentu saya bicarakan dengan tentara lebih dahulu, untuk jangan sampai nanti ada clash, sebab saya tidak mau kalau umpunya saja adalah suatu perjuangan kita lantas saling bertemu (berlawanan). Saya pernah mempunyai pasukan siluman, ada orang resimen mempunyai pasukan Siluman, ada orang resimen (lain) mempunyai pasukan siluman, pasukan siluman (milik) saya (lalu) saya bubarkan, saya masukan ke mereka, jangan sampai ada dua pasukan siluman.<sup>142</sup>

Di masa-masa ini, Kromo Lawi tidak merasa kurang berhubungan dengan kelompok laskar dari golongan Hizbullah. Hizbullah Dia merasa tidak pernah duduk satu meja dan membahas kerjasama di masa-masa sulit itu. Dibanding Hizbullah, Barisan Banteng lebih dekat dengan tentara dibandingkan barisan yang lainnya.

Kromo Lawi tidak lama dalam gerilyanya. Ketika terjadi Peristiwa Madiun pada 18 September 1948, yang dikait-kaitkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), Kromo Lawi dikaitkain lagi. Maka Kromo Lawi pun ditahan lagi di Yogyakarta. Padahal dia lebih dikenal sebagai pengikut Sukarno daripada sebagai pengikut Musso.

### **Peduli Kepada Sejarah**

Setelah Tentara Belanda angkat kaki dari Indonesia, barulah pada 1950 Kromo Lawi dibebaskan dari penjara. Dalam keadaan yang damai itu, Kromo Lawi melanjutkan kehidupan barunya. Dia kembali ke Pekalongan dan memimpin kembali Partai Nasional Indonesia (PNI) di sana.

Di masa-masa baru ini, Muhammadiyah sudah menjadi bagian dari Majelis Syuro Ulama Indonesia (Masyumi). Di era 1950-an ini, Kromo Lawi yang

<sup>141</sup> Pierre Heijboer, Agresi militer Belandamemperebutkan pending zamrud sepanjang khatulistiwa 1945/1949, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 1998, hlm. 60.

<sup>142</sup> Wawancara Anton E. Lucas dengan Kromo Lawi di Pekalongan, 7 Juni 1973.

sebelumnya Pembina pandu Hizbul Wathan lalu menarik diri dari Muhammadiyah. Meski istrinya juga guru di sekolah Muhammadiyah.

Dharmono Lawi: Tapi karena di tahun 1950an diminta untuk memilih Masyumi, Bapak saya berhenti, keluar. Kan sudah berpolitik Bapak saya. Klaimnya kok MUhammadiyah harus Masyumi.<sup>143</sup>

Dalam Pemilu 1955 dia menjadi salah satu calon PNI untuk duduk di konstituante. Sebuah badan yang sedianya akan bekerja membuat undang-undang dasar baru. PNI pemenang nomor satu dalam Pemilu 1955 itu. Dalam Pemilu 1955 membuktikan bahwa PNI di Pekalongan adalah partai politik terbesar ketiga setelah NU dan Masyumi. Di Pekalongan, Kromo Lawi menjadi Ketua dan Amin sebagai Wakil Ketua.

Basis PNI tentu saja wong cilik, yang jumlahnya sangat banyak, seperti petani kecil, nelayan, pedagang kecil dan buruh. Di Pekalongan dulu terdapat Kesatuan Buruh Marhein (KBM) untuk para buruh; Kesatuan NelayanIndonesia (KNI) untuk para nelayan; Persatuan Tani Nasional (Pertani) untuk para petani; dan di bidang kesenian terdapat Lembaga Kesenian Nasional.<sup>144</sup>

Tak hanya kemenangan PNI saja yang menjadi hal penting di tahun itu. Tapi juga tentang kelahiran anaknya laki-laki bungsunya.

Dharmono Lawi: Bapak saya sedang kongkow di rumah dinas Pak Iskandar Said, dapat berita dari kakak Setyadhi Lawi, yang mengabarkan saya sudah lahir pada 16 Desember 1955, nama saya Dharmono Konstituanto Yoga (yang artinya anak Konstituante, seperti dapat inspirasi dari kawannya itu).<sup>145</sup>

Iskandar Said adalah ayah Jaksa Agung Ali Said. Namun ternyata Kromo Lawi pada tahun berikutnya malah masuk Parlemen di daerah. Kromo Lawi menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kota Pekalongan dari 1956 hingga 1961.

Kromo Lawi di tahun 1956 adalah koordinator PNI untuk keresidenan Pekalongan.<sup>146</sup>

Kromo Lawi setelah 1955 tentu bagian dari kebesaran PNI di Pekalongan. Namun masa bahagia PNI itu harus meredup setelah 1965. Setelah kudeta gagal

---

<sup>143</sup> Wawancara Dharmono Konstituanto Yoga bin Kr. Lawi Soemodihardjo, Jakarta, 3 Januari 2023.

<sup>144</sup> J. Mardimin, *Perlawanan Politik Santri: i Kajian tentang Pudarnya Kewibawaan dan Pengaruh Kiai, Perlawanan Politik Santri, serta Dampaknya bagi Perkembangan Partai-partai Politik Islam di Pekalongan* (disertasi), Salatiga, Doktor Studi Pembangunan Program Pascasarjana UKSW, 2016, hlm, 126.

<sup>145</sup> Wawancara Dharmono Konstituanto Yoga bin Kr. Lawi Soemodihardjo, Bandung, 28 Januari 2023.

<sup>146</sup> *PNI Middels Java wil niet niet communisten samenwerken*, Indische courant voor Nederland, 09-09-1957

Letnan Kolonel Untung dalam G30S. Setelah kegagalan Untung itu, Angkatan Darat menjadi sangat kuat daripada sebelumnya.

Di dalam tubuh PNI sendiri lalu muncul pertentangan. Ada yang ikut kelompok Ali Sastroamidjojo dan Ir Surachman yang dikenal sebagai PNI ASU dan didianggap PNI Progresif dan ada pula yang berada di kelompok PNI Osa Maliki dan Usep Ranawidjaja yang dikenal sebagai PNI Osa Usep dan dianggap PNI Konservatif.<sup>147</sup>

Kelompok PNI ASU adalah pendukung Sukarno dan kelompok PNI OSA Usep cenderung mengikuti alur sejarah. Pertentangan internal ini cukup keras. Osa Maliki bahkan juga Kromo Lawi (yang ikut kelompok Osa Maliki) pun dipecat dari PNI.

PNI Osa Usep: Saudara Kromo Lawi dari Pekalongan, yang sejak zaman penjajahan berjuang dan tidak mempunyai tanah atau perusahaan atau penghidupan. Yang menendang adalah Mr. Ali Sastroamidjojo yang dengan mensalahgunakan fungsinya sebagai Menteri Koordinator merangkap Wakil Ketua MPRS, selalu hendak memaksakan pendiriannya sendiri.<sup>148</sup>

Awal 1966, Pemecatan anggota-anggota PNI itu dengan segera dianulir oleh Ketua Umum PNI Ali Sastroamidjojo. Namun pertentangan antara mendukung atau melawan orde baru belumlah selesai di masa peninjauan kembali itu.

Warta Berita: Sebagai follow-up dari instruksi Ketua Umum PNI Ali Sastroamidjojo tanggal 7 Januari 1966 untuk mengadakan peninjauan kembali mengenai pemecatan-pemecatan sementara terhadap anggota-anggota PNI dan Gerakan Massa Marhaen, maka dalam sidangnya tanggal 9 Januari 1966 DPP PNI telah mengambil keputusan mencabut pemecatan sementara antara lain atas diri: Osa Maliki (Bandung), Muh, Achmad (Bendung), Sabilal Rasjid (Jakarta), Karim Muh Doa (Jakarta), Kromo Lawi (Pekalongan), Drs. F. Sutrisno (Semarang), Sugeng Tirtosiswoto (Cilacap), Omar Said (Semarang), Sastrosuparno (Boyolali), Gurawan Permadhi (Semarang). Dalam pada itu Pimpinan PNI di daerah-daerah dan Pimpinan Gerakan Massa Marhaen di pusat dan di daerah juga telah dan sedang mengadakan peninjauan kembali terhadap anggota-anggota yang telah dipecat sementara.<sup>149</sup>

---

<sup>147</sup> Wawancara Dharmono Konstituanto Yoga bin Kr. Lawi Soemodihardjo, Jakarta, 3 Januari 2023.

<sup>148</sup> Siasat Memejah-Belah P.N.I. Sebagai Prolog Pengchianatan G-30-S/PKI., Jakarta, Partai Nasional Indonesia, 1966, hlm. 32.

<sup>149</sup> DPP PNI Tjabut Kembali Pemecatan Terhadap Anggauta2nja, Warta Berita, 11 Januari 1966.

Tragedi PNI terus berlanjut. Kedua kubu saling beradu tulisan. Osa Maliki yang pemimpin organisasi Jamiatul Muslimin itu terlibat dalam penulisan Dengan Marhaenisme Menuju Masyarakat Sosialis Pantja Sila (1967) dan Marhaenisme Bertentangan dengan Marxisme (1968). Di tahun 1965 ia menyusun buku Siapakah yang Sebenarnya Marhaenis Gadungan?

Ali Sastroamidjojo kemudian digantikan Osa Maliki selaku Ketua Umum PNI. Di mana Angkatan Darat mendukungnya. Kala itu tak ada jalan lain bagi PNI untuk bertahan hidup. Sebab sesuatu yang netral, setia kepada Sukarno dan membiarkan PKI tidak akan bisa hidup setelah 1966. Angin politik Indonesia sedang berubah sangat jauh kala itu.

Paulus Widyanto: Kepemimpinan Osa dan Usep kemudian melakukan apa yang merugikan lawan-lawan dari pendiri Orde Baru. Sebagai tokoh religius dan anti komunis, dia membawa partainya ke barisan Orde Baru.<sup>150</sup>

Maka selamatlah PNI. PKI sudah tentu dibubarkan pada 12 Maret 1966 dan menjadi terlarang sepanjang orde baru. Tak hanya dilarang, istilah PKI lalu kerap menjadi senjata untuk menjatuhkan orang lain.

Selain tidak menyenangkannya kondisi PNI yang terpecah di tahun 1966, nasib salah satu anak laki-laki Kromo Lawi yang sedang menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tidaklah menyenangkan, yakni Heru Sundjoto Murba.

Dharmono Lawi: Heru ditahan tanpa proses hukum di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri). Dia sebagai anggota Brigade Mobil (Brimob) bagian Lapis Baja. Dia ditahan sejak 1967 dan bebas sewaktu Pak Hoegeng jadi Kapolri.<sup>151</sup>

Heru ketika ditahan belum genap berusia sekitar 20 tahun. Dia kira-kira berpangkat Bhayangkara Dua. Dia kelahiran 19 Desember 1947.<sup>152</sup> Dari namanya, Kromo Lawi tampak terpengaruh dengan Tan Malaka, yang juga mengusung ideologi kerakyatan. Murba singkatan dari Musyawarah Rakyat Banyak dan setelah 1950 menjadi salah satu partai politik di Indonesia.

Namun PNI tidak dibiarkan utuh lebih lama. Setelah Pemilu 1971, yang mana PNI tidak berjaya lagi seperti di tahun 1955, PNI diharuskan untuk berfusi dengan partai-partai lain: Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Musyawarah

---

<sup>150</sup> Paulus Widyanto, Osa Maliki dan Tragedi PNI: Konflik Intern Pra dan Pasca 1965, artikel Jurnal Prisma Di atas panggung sejarah dari Sultan ke Ali Moertopo, LP3ES, 1991, hlm. 9.

<sup>151</sup> Pesan tertulis Dharmono Konstituanto Yoga bin Kr Lawi Soemodihardjo, 30 Januari 2023.

<sup>152</sup> Daftar nama anak-anak Kromo Lawi yang dibuat Setyahdi Lawi di Pekalongan 7 Mei 1990 (Arsip Koleksi Dharmono Konstituanto Yoga b Kr Lawi Soemodihardjo).

Rakyat Banyak (Partai Murba), Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (Partai IPKI) dan juga dua partai keagamaan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik. Mereka berkumpul pada hari rabu 10 Januari 1973, pukul 20.00 malam di sekretariat Partai Nasional Indonesia (PNI) di Salemba raya, Jakarta partai-partai itu bertemu.

Para pemimpin partai itu telah mencapai kata sepakat membubuhkan tanda tangan tanpa cap partai pada sebuah deklarasi. Mereka menyatakan kelima partai yang hadir berfusi dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI).<sup>153</sup>

Maka Kromo Lawi pun harus rela menjadikan dirinya PDIP. Kala itu Kromo Lawi sudah 73 tahun usianya. Dia makin sepuh. Namun putranya Setyadji Lawi kemudian meneruskan jejaknya di PDI. Setelahnya anak-anaknya yang lain menyusul masuk ke politik. Termasuk Dharmono Lawi.

Kromo Lawi punya warisan tersendiri ketika menjadi anggota parlemen. Ketika Kromo Lawi menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR). Kromo Lawi tidak menjadi anggota DPRGR yang pendiam di sana. Termasuk dalam hal kesejarahan RI.

Inisiatif DPR-GR sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya menurut Tata tertib DPR-GR hendaklah tidak boleh dikendorkan, apalagi dimatikan. Karena itu kami mintakan perhatian Pemerintah akan ketentuan lebih lanjut terhadap penyelesaian Usul Inisiatif Kromo Lawi dkk tentang RUU tentang Kearsipan Nasional (hubungan Penpres No. 19/1961). Usul inisiatif Djazim dkk tentang Penjabatan Penpres No. 7/1963 tentang Lockout dll. lagi, dengan mengingat pasal 2 RUU tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden menjadi Undang-undang.<sup>154</sup>

Undang-undang Lembaga kearsipan itu digulirkan pada 1968, setelah Soeharto menjadi Presiden RI. Kala itu pihak Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) terlihat hanya merawat arsip-arsip kolonial peninggalan zaman VOC dan Hindia Belanda lalu arsip dari zaman pendudukan Jepang.

Kromo Lawi 24 September 1968: Karena itu lebih tepat jika Kantor Arsip Nasional kita beri nama Kantor Arsip Kolonial, bila keadaan seperti itu sekarang ini [...] kalau seorang warga asing datang ke Indonesia dan berani membayar \$ 1.000 untuk searik kertas Proklamasi asli tahun 1945 yang kumal, maka bangsa Indonesia

<sup>153</sup> Majalah Historia edisi 50 tahun PDIP 2023, hlm. ????.

<sup>154</sup> Undang-undang Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang Buku Sati bagian Kedua, Jakarta, Departemen Kehakiman, 1972, hlm. 26

melepaskan naskah penting dengan mudahnya untuk harga setelan atau kecontong kacang.<sup>155</sup>

Rupanya arsip-arsip penting Indonesia banyak diperjualbelikan oleh sebuah jawatan. Bahkan katanya setelah 23 tahun Indonesia merdeka, belum ada satu departemen pun yang menyerahkan arsip-arsip lembaganya kepada kantor Arsip Nasional, yang kala itu berkantor di Jalan Gajah Mada Jakarta.

Pada bulan September 1968 itu, semua fraksi di DPRGR sudah memberikan tandatangan persetujuannya, kecuali fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan Partai Muslimin Indonesia. Pihak yang terakhir kala itu sedang berkongres di Yogyakarta. Kala itu itu di tubuh ABRI sudah Lembaga sejarah sendiri. Bagi Kromo Lawi dan kawan-kawan pengusulnya merasa bahwa naskah sejarah itu harus ada agar generasi muda bisa melakukan penelitian sejarah Indonesia.

Kromo Lawi yang peduli dengan sejarah, lima tahun setelah pengusulannya tentang penyelamatan naskah-naskah sejarah itu kedatangan seorang peneliti muda dari Australia bernama Anton Lucas. Kromo Lawi memberikan banyak keterangan kepada Anton Lucas, yang kemudian merilis hasil penelitiannya tentang Peristiwa Tiga Daerah. Di mana Kromo Lawi menjadi orang yang harus dikurung.

Setahun sebelum kepergiannya, di tahun 1977, nama Kromo Lawi tercantum sebagai calon anggota DPR 1977 mewakili PDI dengan daerah pemilihan Jawa Tengah.<sup>156</sup>

### **Lampiran:**

#### **Marine di Hindia Belanda**

Sudahlah lama penulis baru mengerjakan pena di dalam “Sitjantik” Oetoesan Hindia. Begitulah penulis hendak menguraikan bagaimana keadaan dalam Marine.

Dalam Marine lama-kelamaan, selamanya Kapten Laut Rambonet memegang pekerjaan Menteri, rupa-rupa hal kejadian yang tidak pantas dan kurang senonoh dikerjakan oleh Bond van Mindere Marine Personeel.

Begitulah niatnya Excelentie Minister van Marine maunya membikin patah lehernya segala perhimpunan di dalam Marine.

Sudahlah kejadian hamba (penulis) sudah dapat straf (hukuman 8 hari provost, yaitu tanggal 4 Mei sampai 12 Mei 1916, dari lantaran kedatangan buku-buku perhimpunan Sinar Laoetan dan Statutennya perhimpunan Sarekat Islam dan Inlandsch Studie en Wazenfonds, dan satu lembar surat kabar het Anker.

Maka 8 yang hari provost, hamba terima dan tadinya penulis hendak mengadukan kepada Hoog Militaire Gerechtschaf, tetapi percuma, sebab yang 8 hari provost mesti dijalani lebih dahulu, jadi dalam Marine tidak memounyai keadilan, dan bagaimana rupanya *Wet* (undang-undang) Militer.

<sup>155</sup> Naskah-naskah Sejarah Perlu Di Selamatkan, Sinar Harapan, 14 Desember 2020.

<sup>156</sup> Majalah Parleментарia nomor 74 tahun 1977, hlm. 87; Majalah Parleментарia nomor 75 tahun 1977, hlm. 103.; Penyelenggaraan pemilihan umum 1977 di Jawa Tengah Volumes 1-2, Jakarta, Panitia Pemilihan Daerah, 1977, hlm. 225.

Begitulah juga kapal-kapal perang di Hindia Belanda, lain komandan lain perintah, tidak menurut bagaimana kemestiannya.

Mulai penulis masuk dinas, belum menandai perjanjian, lebih dahulu dikasih tiap-tiap, bagaimana kemestiannya memegang dalam dinas militer, bahwa *segala orang-orang bangsa militer, tiada boleh memegang dinas sesukanya, dan mesti menurut perintah dengan aturan yang tetap.*

Begitu juga pembesar Marine tidak ingat memegang aturan yang tersebut diatas:

Maka *aturan yang tetap tetap*, bukanlah yang ditetapkan oleh satu komandan di kapal perang, yang sesuka-sukanya, tetapi ditetapkan oleh perintah yang lebih luhur.

Begitulah dari perhimpunan Sinar Laoetan, yaitu perhimpunan matros-matros (kelasi-kelasi) bumiputra dalam Marine sudah mulai seperti kapal ditengah lautan kena gelombang.

Begitulah perhimpunan Sinar Laoetan, belum tentu berdiri terus, tetapi banyak opsir-opsir (perwira-perwira) yang cemburuan!! Tentu penulis pikir, kalau anak buahnya maju, yang dipertuan tidak suka.

Sedang surat kabar Het Anker, yaitu organisasinya Bond voor Mindere Marine Personeel dilarang dan tidak boleh dibaca oleh anak buahnya kapal perang di Hindia dan di Belanda, tetapi siapa? Belandakah? Jawakah?

Maka dalam Marine ada dua bangsa yaitu Jawad an Belanda, tetapi yang mengasih order (perintah) tidak terang, juga di dalam Algemeene Baksorder tida disebut apa-apa.

Undang-undang pun tidak ada, Cuma dikasih orde itu tempo saja, jadi orang tidak tahu buat siapa dan siapa yang tida boleh membaca surat kabar Het Anker.

Selamanya penulis dalam Marine, belumlah melihat seorang bumiputra, yang di dalam Marine memikirkan bagaimana nasibnya diumpamakan seperti binatang, melainkan masih tetap pakai kaum tua.

Sedang di kapal-kapal perang, jaranglah ia dapat pengajaran yang betul, melainkan sederhana saja, maka dari hal menjadi dibiarkan saj aoleh komandannya.

Lagi masih penulis ada di opleiding (pelatihan) di Makassar, begitu juga ampir-ampir hendak dibikin sesukanya oleh yang wajib dan lagi kalau seandainya tidak berdaya upaya tentu kromo hendak diumpamakan seekor binatang.

Betullah kami orang sudah jual jiwa buat lamanya enam tahun, yang enam tahun itu buat *membela tanah air kita*, bukannya hendak dibikin binatang.

Selamanya penulis memegang dinas militer, belum tahu di dalam satu kapal perang lamanya satu tahun., tidak lama terus dipindah ke lain kapal, sebab banyak opsir yang cemburuan.

Maka dari cemburuan, bukannya dari apa-apa, tidak lain Cuma sebab penulis suka turut campur dari pergerakannya bumiputra .

Hm!! Kalau begitu selamanya dalam Marine masih tetap, tentu dan lebih baik pembesar Marine tidak usah mengambil lagi bangsa Jawa buat keperluannya militer!

Begitu juga dari hal penghinaan, tidak saja di dalam luar dinas militer, di dalam Marine lebih-lebih kepada bangsa Jawa, tetapi kita tidak merasa salah, melainkan “takut karena salah dan berani karena benar.”

Maka dari hal perhimpunan Sinar Laoetan tidak buat akan berontak, dan lain-lain kejahatan, melainkan buat merukunkan bangsa dan supaya setia memegang kewajibannya.

Tetapi memang sudah nasibnya kaum kromo, ia mau apa lagi, toh Cuma orang Jawa saja, toh begitu dia pikir, orang Jawa bukannya orang.

Begitulah penulis masygul sekali masuk dalam dinas militer, bukannya masygul dari buat lantaran membela bendera Belanda, tetapi dari lantaran “militer tidak punya rechtvaardigheid.”

Lagi tempo tanggal 7 Mei 1916, kebetulan hari minggu, matros-matros Belanda membikin demonstrasi, maka Komisaris Kepala Polisi Beltgens mencegah serta berteriak:

“Patuhi hukum!

“Atas nama Raja!

Tetapi Marine begini:

Patuhi komandanmu!

Atas nama Rambonet, ex Menteri Angkatan Laut!

Pada hari kamis telah lalu, 4 Mei 1916, kira-kira pukul 10 pagi, penulis diperiksa Kolonel Kroon, komandan markas Angkatan Laut Gubeng Pojok, Surabaya, dengan disaksikan oleh Tuan Kapten Marinir Bakker, Letnan Laut Kelas Dua Palm, dua opsir rendahan dan satu marinir, bahwa penulis *onbetrouwbaar* (tidak bisa diandalkan) dalam dinas, dari sebab melanggar perintah, yang dilarang pembesar-pembesar Marine.

Maka penulis menanya kembali bahwa yang mana maksudnya, dari sebab penulis *onbetrouwbaar*, dan bangsa Jawa melanggar perintah militer. Maka jawaban Kolonel Kroon, bahwa penulis suka menyimpan buku-buku SL.HR dan statutenya SL. SI dan I.S.W.I.N.I. dan organnya BVMPP yaitu Het Anker.

Kira setengah jam lamanya, dengan sudah, bahwa penulis mesti dapat *straf* besar, dari sebab penulis tidak memegang perintah apa eperluannya orang militer.

Kira pukul 12 kurang seperempat, ada sinyal, maka penulis mesti datang sama opsir jaga dan penulis dapat persen dari busnya Kolonel Kroon, buat 8 hari provost dengan gewone voiding (hm!! ‘t is wel rojal)

Maka yang 8 hari provost penulis terima dan kalau tidak terima, toh mesti menjalaninya juga.

Dari itu di Marine, tidak peduli Jawa atau Belanda, tidak mempunyai pengadilan.

Maka dari *organisatieleven* (kehidupan organisasi), Kolonel Kroon, tidak ingat dari *Alegemeene baksorde* artikel 33 dan *Regeringreglement* artikel III.

Tetapi pikirannya Kolonel Kroon dikira penulis melawan artikel 32 dari *Algemeene baksorde*.

Jadi dalam siasat peperangan di laut dan dalam *Algemeene Baksorde*, maka percuma saja dengan “atas nama Raja” maunya “atas nama komandan dari kapal perang.”

Tetapi kalau Menteri Angkatan Laut dulu, tentu diurus betul-betul dari hal perintah dalam Marine, tidak dengan sesukanya salah satu komandan dari kapal-kapal perang.

Sampai disinilah penulis memberhentikan ujung pena penulis dan lain hari

bisa ketemu lagi dalam Oetoesan Hindia yang kita cintai. Dan selainnya membilang terimakasih pada engku redaksi.

M Argawidjaja.  
Salah satu anggota kapal besi HrMs Zeven Provincien.  
Di laut 23 Mei 1916.<sup>157</sup>

### **Ketakutan akan SI di Angkatan Laut**

Pada tanggal 18 Februari, semua bumiputra di kapal dan lembaga dari Angkatan Laut diperintahkan untuk membongkar kotak ransel mereka. Penyebab perintah kemungkinan besar ingin mencari tahu, karena takut ada anggota SI yang tersembunyi di antara orang Jawa.

Kenapa berpikiran seperti itu? Beberapa Bumiputra ditanya apakah mereka anggota SI.

Mengejutkan, hal itu terjadi segera setelah pertemuan Bond van Inlandsche Marine Personeel (perkumpulan anggota Angkatan Laut Bumiputra) di Gedung SI. (Bangunan yang dimaksud Tamang Tamalian, sebuah tempat berkumpul orang-orang Bumiputra, yang tidak ada hubungannya dengan SI.) Tentu saja hasil penyelidikannya adalah: tak seperti yang diminta. Pihak berwenang masih menganggap orang Jawa begitu bodoh untuk meletakkan kertas, tidak dimaksudkan untuk mata orang yang belum tahu, di loker mereka di daratan. Taktik orang Jawa terbukti lebih baik daripada para bapak-bapak. Karena ketiadaan dokumen rahasia, seorang Jawa di kapal De Zeven Provincien punya seikat isu: Het Vrije Woord dibawa pergi dan dikirim ke Departemen Angkatan Laut. Terhadap komentar pelaut apakah itu bacaan terlarang, Perwira itu menjawab setuju. Semuanya terlalu jelas bahwa pria ini bertindak melawan penilaiannya yang lebih baik, karena Het Vrije Woord belum dilarang di atas kapal. Di mana hak berkumpul masih ada, mereka pasti ingin menemukan titik di mana orang dapat menunjuk jari sebagai tidak mungkin dengan pemeliharaan disiplin yang baik. Dapat diramalkan bahwa seseorang akan ingin menghancurkan Bond itu, seperti di masa lalu Bond van Mindere Marine Personeel (BVMMP). Biarkan Tuhan mengakhiri permainan ini: upaya sia-sia. Harus diingat bahwa Sinar Laoetan harus melewati jalur tertentu sebelum terbenam. Dapat diramalkan bahwa seseorang akan ingin menghancurkan Bond itu, seperti di masa lalu BVMMP. Biarkan Tuhan mengakhiri permainan ini: upaya sia-sia. Harus diingat bahwa Sinar Laoetan harus melewati jalur tertentu sebelum terbenam. Dapat diramalkan bahwa seseorang akan ingin menghancurkan Bond tersebut, seperti di masa lalu BVMMP. Biarkan Tuan mengakhiri permainan ini: usaha sia-sia.

Harus diingat bahwa Sinar Laoetan harus melewati jalur tertentu sebelum terbenam. Menurut sekretaris perkumpulan itu, yang telah dipanggil ke Inspektur Polisi Beltgens, semua keributan ini disebabkan oleh perwira Heilige Hermandad yang berjasa ini. Apakah karakter itu mungkin ingin menjadi populer?

---

<sup>157</sup> Marine di Hindia Belanda, Oetoesan Hindia (29/05/1916)

Namun, dia dapat diyakinkan tentang ketakutannya terhadap pendukung SI di Koninklijk Marine.

Mengapa orang Jawa menyangkal haknya, di mana kewajiban dituntut darinya?

Lawan<sup>158</sup>

Jangan Sampai Melewati Garis

(Baris)

Awas! Penting, Penting Sekali!!!

(Bagi Militer, terutama buat Inlandsch Schapelingen)

Sebelum berlangkah harus diarah-arrah, perlunya jangan sampai menyesal di kemudian hari, yaitu sampai menjadi korban di curam kesengsaraan, padahal buat umum-umum semata-mata tidak seberapa gunanya.

Lantaran yang demikian, kita terutama merasa memetic bekend making di MKO yang tertanda 27/7-29 hal verboden lectuur. (sudah tentu buat saudara yang belum tahu). Dibawah inilah lectuur yang terlarang:

1. De Vrije Socialist
2. De Wapen neer
3. De Vrijedenker
4. Socialistische liederen
5. De Notenkraaker
6. Recht ne Vrijheid
7. Frank v. Wezels roemruchte Jaren
8. Tribune
9. De Proletarische vrouw
10. De Jonge arbeider
11. De Moker
12. Njala
13. Api
14. Keng Po
15. Sin Po
16. Soeara Publiek
17. Warna Warta
18. Hidoep
19. De Klok
20. Medan Moeslimin
21. Mowo
22. Panggoegah
23. Proletar
24. Soeara Rajat
25. Soerapati
26. Wewarah Islam

---

<sup>158</sup> Vrees Voor de SI Bij de Koninklijke Marine, Het Vrije Woord (17/03/1917).

27. Sinar Minahasa
28. Perasaan Kita.
29. Azis
30. Soeloeh Indonesia Moeda
31. Sinar Indonesia
32. Jong Indonesia

Jadi Inlandsche Schepelingen (terutama leden IMB) terlarang membaca atau berlangganan surat kabar tersebut di atas. Jika kiranya tuan-tuan akan mengetahui perkabaran atau keadaan dimana-mana, toh tuan masih ada kemerdekaan buat membaca surat-surat kabar lain, asal bukan sebagai tersebut, umpama: De Locomotief, Bintang Timoer, Isteri, Pandji Poestaka dan lain-lainnya. Lebih baik jika tuan-tuan suka membaca vakbladen, seperti: Het Kompas, Het Postblad, Oentoek Keperloeian Kita, Soeara Douane dll. Yang supaya tuan-tuan dapat meluaskan pandangan dalam vakbewaging, karena itu semua dikeluarkan oleh vakverenigingen.<sup>159</sup>

#### **Profil Kromo Lawi versi Anton Lucas.**<sup>160</sup>

KROMO LAWI (Lawi Sumodiharjo) yang lahir di Batang pada tahun 1900 berpendidikan Sekolah Dasar Angka Dua (5 tahun) di Purworejo dan HIS Pekalongan. Setelah belajar setahun di Sekolah Kehutanan Sukabumi, ia lalu bekerja di kereta api SCS di Batang dan Comal. Pada tahun 1920 ia masuk Sekolah Pelayaran Pribumi di Makasar, dan setamat sekolahnya itu ia membentuk Indische Marine Bond (Ikatan Pelaut Pribumi), yang salah satu tujuannya ialah memperjuangkan kenaikan upah bagi pelaut pribumi. Pada bulan November 1926, bersama beberapa anggota Indische Marine Bond (IMB) lainnya, ia ditangkap atas tuduhan mendukung pemberontakan PKI di Surabaya, dan dipecat dari pekerjaannya. Pada tahun 1927 ia pertama-tama mendirikan PNI cabang Pekalongan, dan masuk Pemuda Muhammadiyah sebagai pelindung kegiatannya. Pada bulan Agustus 1929 ia berusaha mendirikan cabang Sarekat Kaum Buruh, tetapi diganggu dan dihalangi polisi. Pada tahun 1930 ia dikenai penahanan sementara, dan setelah itu ia menjadi pemimpin kepanduan Hizbul Wathan (Muhammadiyah), juga untuk melindungi pergerakannya. Pada bulan April 1931 ia membubarkan cabang PNI dan memberikan dana keuangan partai itu kepada Taman Siswa, tetapi dalam bulan Juni tahun itu juga ia menjadi ketua cabang Partindo, partai yang dibentuk Mr. Sartono setelah PNI dibubarkan. Pada tahun 1934 ia dijebloskan lagi ke penjara. Sebelum pendudukan Jepang ia menjadi ketua cabang Gerindo, dan pada zaman pendudukan Jepang ia tampil menjadi ketua Putera dan bagian usaha dari Jawa Hokokai, dan anggota Dewan Penasihat

---

<sup>159</sup> Djangan Sampai Meliwati Garis, Sinar Laoetan no. 6, Januari 1930)

<sup>160</sup> Anton Lucas, Peristiwa Tiga Daerah Revolusi Dalam Revolusi (1989, 328)

Keresidenan. Setelah Proklamasi ia menjadi anggota KNI Pekalongan, namun setelah peristiwa pembunuhan massal kenpeitai ia ditangkap atas tuduhan menjadi anggota kipas hitam (organisasi ultra nasionalis pro-Jepang bentukan Jepang), dipenjarakan, dan kemudian dibebaskan atas desakan Sayuti Melik. Sayuti Melik mengirimkan Kromo Lawi guna menemui para pemimpin Tiga Daerah, ditahan di Pematang dan dikirimkan ke markas AMRI Slawi, sampai TNI menjumpainya di sana, dan menuduhnya terlibat Peristiwa Tiga Daerah, sehingga ia dipenjarakan sampai bulan Januari 1947. Pada tahun 1947 ia menjadi anggota Biro Perjuangan dan selama Aksi Militer Belanda Pertama ia memimpin gerilya Barisan Banteng di dataran tinggi Dieng, bagian dari Resimen ke-17 TKR. Karena dituduh pro-PK pada peristiwa Madiun, maka ia pun ikut ditahan di Yogyakarta. Setelah tahun 1950 ia kembali ke Pekalongan dan memimpin PNI sampai pemilihan umum tahun 1955.

### **KRONIK KROMO LAWI**

1. 1900: Lawi lahir di Batang, Jawa Tengah, sebagai anak dari Abdulrahman Kartodidjojo dan Umi Habibabdengan nama Lawi Sumodiharjo
2. 1918: Lawi sedang belajar di sekolah pelayaran Angkatan Laut *Kweekschool voor Inlandsche Schepelingen* (KIS) Makassar.
3. 1925: Lawi ikut mendirikan perkumpulan pelaut bumiputra *Inlandsche Marine Bond* (IMB) di rumahnya di Surabaya pada 25 Mei 1925 dan menjadi sekeretaris organisasi ini.
4. 1927: Lawi dipecat dari Angkatan Laut pada bulan Maret 1927 lalu pulang ke Pekalongan dengan diawasi PID. Awalnya di Muhammadiyah sebelum di Partai Nasional Indonesia (PNI).
5. 1928: Lawi menjadi Ketua PNI cabang Pekalongan, menggantikan Dr Notonindito yang dianggap dekat dengan pemerintah kolonial.
6. 1929: Lawi ditangkap polisi kolonial pada Desember 1929 dan ditahan selama lima bulan. Sebelumnya Lawi ikut mendirikan Serikat Kaum Buruh cabang Pekalongan.
7. 1930: Lawi dibebaskan dan terus menjadi Pembina kepanduan Hizbul Wathan milik Muhammadiyah.
8. 1931: Lawi masuk ke Partai Indonesia (Partindo), penerus PNI yang dipimpin oleh Mr Sartono. dan menjadi ketua cabang Pekalongan pada Juni 1931.
9. 1933: Lawi ditangkap di Sukabumi pada 8 Agustus 1933, setelah bertemu Mr Sartono di Jatinegara. Dia dikaitkan dengan Pemberontakan Zeven Provincien.
10. 1937: Lawi terlibat di Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo), yang berdiri pada 24 Mei 1937, dimana dia juga lalu menjadi ketuanya. Setelah Partindo bubar pada tahun sebelumnya.
11. 1938: Lawi ikut menggalang adanya Indonesia Berparlemen dalam Gabungan Politik Indonesia (GAPI).
12. 1943: Lawi menjadi Ketua Pusat Tenaga Rakjat (Putera) cabang Pekalongan. Putera dijadikannya alat berpolitik di Pekalongan.

13. 1944: Lawi bergiat di bagian usaha dari Jawa Hokokai yang berdiri Januari 1944 sebagai pengganti Jawa Hokokai.
14. 1945: Lawi ikut mengabarkan berita proklamasi 17 Agustus 1945 lalu menjadi anggota Komite Nasional Indonesia (KNI) daerah Pekalongan. Sempat ditahan ketika Pertempuran 3 Oktober 1945 dan semasa revolusi sosial Tiga Daerah.
15. 1947: Lawi yang baru dilepaskan dari penjara lalu ikut Biro Perjuangan lalu bergerilya di daerah Dieng melawan Tentara Belanda, bersama Barisan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
16. 1948: Lawi ditahan tanpa pengadilan karena dianggap terlibat dalam Peristiwa Madiun September 1948, meski tak terlibat.
17. 1950: Lawi dibebaskan dari tahanan dan kembali ke Pekalongan. Dia kembali memimpin PNI Pekalongan.
18. 1955: Lawi mencalonkan diri sebagai calon anggota Konstituante dalam Pemilu Pertama 1955 mewakili PNI Jawa Tengah.
19. 1956: Lawi diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Kota Pekalongan. Hingga 1961 dia anggota DPRD di sana.
20. 1966: Lawi sempat dipecat dari PNI ketika PNI terpecah pasca G30S, namun pemecatannya bersama Osa Maliki dan tokoh PNI lain ditinjau kembali. Menjadi anggota DPRGR.
21. 1978: Lawi Soemodihardjo tutup usia pada 21 Desember 1978, menyusul kepergian istrinya dua bulan sebelumnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Mohamad Lawi Soemodihardjo. Bukan sebagai Kromo Lawi. Nama Kromo pada dirinya barulah didapatkannya setelah dia dewasa, setelah dia terlibat dalam perjuangan bernafaskan kerakyatan di Partai Nasional Indonesia. Sebelum dikenal sebagai Kromo Lawi, dia hanyalah Mohamad Lawi Soemodihardjo. Lawi Soemodihardjo terlahir sebagai anak seorang mandor. Lawi pernah bekerja sebentar di perusahaan kereta api di Comal, pemuda asal Batang ini kemudian mendaftar menjadi *Koninklijk Marine* (KM) atau Angkatan Laut Kerajaan Belanda. Lawi bersama dengan teman-temannya kemudia mendirikan *Inlandsch Marine Bond* (IMB) pada 25 Mei 1925. Karena dianggap terlibat pemberontakan PKI di Banten tahun 1926 Lawi dipecat dari *Koninklijk Marine* tahun 1927. Kemudian Lawi kembali ke Pekalongan dan bergabung dengan Muhammadiyah. Lawi kemudian bergabung ke PNI yang dipimpin oleh Sukarno. Tahun 1928 Lawi dipercaya menjadi ketua PNI Pekalongan. Ketika PNI bubar, Lawi kemudian bergabung ke dalam Partindo yang dipimpin oleh Mr Sartono. Lawi menjadi ketua cabang Pekalongan. Di masa-masa menjadi pengikut Sukarno itu, Lawi mendapat nama depan Kromo (Kr), maka dia pun dikenal sebagai Kromo Lawi. Pada tahun 1937 Kromo Lawi bergerak bersama Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) dan menjadi ketuanya di Pekalongan. Lawi juga ikut menggalang agar Indonesia Berpalemen dalam GAPI. Setelah mengalami masa pendudukan Jepang Kromo Lawi juga aktif dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ketika Indonesia telah merdeka,

Kromo Lawi menjadi anggota Komite Nasional Indonesia daerah Pekalongan dan memimpin PNI lagi di Pekalongan.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Bab ini berisi mengenai penghargaan berupa ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang terlibat dan membantu dalam penulisan ini.

### DAFTAR PUSTAKA

#### **Arsip, Buku, Bunga Rampai, Surat Kabar, Manuskrip, Kronik**

40 Tahun PKI, 1960.

Abdul Haris Nasution, *Seputar Perang Kemerdekaan 1: Proklamasi*, Bandung, Disjarah AD, 1977.

Afdelingsvoorzitter van Partindo gearresteerd, *Bataviaasch Nieuwsblad* 09-08-1933.

Ali Sastroamidjojo, *Tonggak-tonggak Perjalananku*, Jakarta, Kinta, 1974.

Allan Akbar, *Memata-matai Kaum Pergerakan: Dinas Intelijen Politik Hindia Belanda 1916-1934*, Serpong, Marjin Kiri, 2013.

Anton Lucas, *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1989.

*Autobiografi R.H. Moh. Amin selaku perintis kemerdekaan*, Jakarta, Direktur Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial, 1986.

*Autobiografi/Biografi Perintis Kemerdekaan*, Jakarta, Direktur Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial, 1993.

Bambang Suwondo, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jawa Tengah*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977.

Basilus Triharyanto, *Pers Perlawanan, Politik Wacana Antikolonialisme Pertja Selatan*, Yogyakarta, LKiS, 2009.

Ben Anderson, *Revoloesi Pemoeda Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*, Serpong, Marjin Kiri.

*Bunga rampai Soempah Pemoeda*, Jakarta, Balai Pustaka, 1978.

*Citra dan perjuangan perintis kemerdekaan: Seri pemberontakan di atas Kapal Hr. Ms. De zeven Provincien*, Jakarta, Direktorat Jendera Bantuan Sosial, 1980.

Daftar nama anak-anak Kromo Lawi yang dibuat Setyahdi Lawi di Pekalongan 7 Mei 1990 (Arsip Koleksi Dharmono Konstituanto Yoga bin Kr Lawi Soemodihardjo).

- Dahlan Ranuwihardjo, *Biografi, pemikiran, dan perjuangan A. Dahlan Ranuwihardjo*, Jakarta Lembaga Studi Informasi Pembangunan, 1995.
- Djangan Sampai Meliwati Garis, *Sinar Laoetan* no. 6, Januari 1930).
- Djoeroe Terbang Boemipoetera Jang Pertama*, *De Militair* (04/02/1928).
- Djoeroe Terbang Boemipoetera Jang Pertama*, *Pandji Poestaka* nomor (24/01/1928).
- DPP PNI Tjabut Kembali Pemecatan Terhadap Anggauta2nja, *Warta Berita*, 11 Januari 1966.
- Ean PNI Incident te Pekalongan, *De locomotief* 13-07-1929.
- Hamka, *Kenang-kenangan 70 Tjujuh Puluh Tahun Buya Hamka*, Jakarta, Pustaka Panjimas, 1983.
- Harsya Bachtiar, *Siapa Dia Perwira Tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat*, Jakarta, Djambatan, 1988.
- Hoengeng Imam Santosa dkk, *Hoengeng Polisi Idaman dan Kenyataaan*, Jakarta, Sinar Harapan, 1993.
- J. Mardimin, *Perlawanan Politik Santri Kajian tentang Pudarnya Kewibawaan dan Pengaruh Kiai, Perlawanan Politik Santri, serta Dampaknya bagi Perkembangan Partai-Partai Politik Islam di Pekalongan* (disertasi), Salatiga, Doktor Studi Pembangunan Program Pascasarjana UKSW, 2016.
- J.C.H. Bloom & Elly Touwen-Bouwsma, *De Zeven Provincien: Ketika Kelasi Indonesia Berontak 1933*, Jakarta, LIPI, 2015.
- J.P. Nieborg, *Indie en de zee: de opleiding tot zeeman in Nederlands-Indie 1743-1962*, Amsterdam, De Bataafsche, 1989.
- Jawablah Ini! *Sinar Laoetan* (nomor 6, September 1929)
- Joyce Lebra, *Tentara Gemblengan Jepang*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1989.
- Kami perkenalkan, Jakarta, Departemen Penerangan Indonesia, 1954.
- Keterangan Sarimin Proc Gem, Invt. File 201 1946.
- Louis de Jong, *Het Koninkrijk de Nederlanden in de Tweede Wareldoorlog—Deel III C Nederlands-Indie III*, Leiden, Martinus Nijhoff, 1986.
- Majalah *Historia* edisi 50 tahun PDIP 2023.
- Majalah *Parlementaria* nomor 74 tahun 1977, hlm. 87; *Majalah Parlementaria* nomor 75 tahun 1977.

- Marine di Hindia Belanda, Oetoesan Hindia (29/05/1916).
- Marwati Djoened Poesponegoro dkk, *Sejarah nasional Indonesia: Zaman Kebangkitan Nasional dan masa Republik Indonesia, +1900-1942*, Jakarta, Balai Pustaka, 2008.
- Mochtar Mas'ued dkk, *Kekerasan kolektif kondisi dan pemicu*, Yogyakarta, P3PK UGM, 2001.
- Muhammad Nuh, *Riwayat Perkembangan Perjuangan Barisan Pelopor di Tegal (Manuskrip) (Koleksi Arsip Digital Anton Lucas)*.
- Naskah-naskah Sejarah Perlu Di Selamatkan, Sinar Harapan, 14 Desember 2020.
- Nurcholish Madjid, *Islam: Doktrin & Peradaban*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Nyak Wali AT, Mr Sartono Karya dan Pengabdianya, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985.
- Opleideng Inlandsche Schapelingen*, Bataviaasch Nieuwsblad (15/05/1914).
- Orang Indonesia Jang Terkemoecka di Djawa, Jakarta, Gunseikan, 1944.
- Partai Indonesia Te Pekalongan, De Sumatra Post 29-07-1931.
- Paulus Widyanto, Osa Maliki dan Tragedi PNI: Konflik Intern Pra dan Pasca 1965, artikel Jurnal Prisma Di atas panggung sejarah dari Sultan ke Ali Moertopo, LP3ES, 1991.
- Penyelenggaraan pemilihan umum 1977 di Jawa Tengah Volumes 1-2, Jakarta, Panitia Pemilihan Daerah, 1977.
- Pesan tertulis Dharmono Konstituanto Yoga bin Kr Lawi Soemodihardjo, 30 Januari 2023.
- Pierre Heijboer, *Agresi militer Belandamemperebutkan pending zamrud sepanjang khatulistiwa 1945/1949*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 1998.
- PNI Middels Java wil niet niet communisten samenwerken*, Indische courant voor Nederland, 09-09-1957.
- Prabowo Subianto, *Kepemimpinan Militer*, Jakarta, Media Pandu Bangsa, 2022.
- Rapport Koninklijk Marine in Nederlandsch Indie 1925*, yang dirilis Koninklijk Marine pada 1925 (Sudono Jusuf, *Sedjarah Perkembangan Angkatan Laut*, Jakarta, Departemen Pertahanan Keamanan, 1971, hlm.6.)
- Riwayat Singkat Inl. Marine Bond (IMB) menurut Kromo Lawi, Pekalongan 20 Mei 1973. (Arsip Koleksi Anton Lucas).
- Robert Cribb & Audrey Kahin, *Kamus Besar Sejarah Indonesia*, Depok, Komunitas Bambu, 2012.
- Ruben nalenan, *Arnold Mononutu, Potret Seorang Patriot*, Jakarta, Gunung Agung, 1981.

- Sarimin Reksodihardjo, *Kenang-kenangan Dari Masa Jang Silam (Sebuah Manuskrip)*, Bandung, 1965.
- Sarli, *Autobiografi Sarli Selaku Perintis Kemerdekaan*, Jakarta, Departemen Sosial RI, 1986.
- Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jawa Tengah*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977.
- Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Periode Perang Kemerdekaan 1945-1950*, Jakarta, Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, 2012.
- Serikat Pegawai Pelaboehan dan Laoetan, Djangkar (01/01/1925)*
- Siasat Memejah-Belah P.N.I. Sebagai Prolog Pengchianatan G-30-S/PKI*, Jakarta, Partai Nasional Indonesia, 1966.
- Sinar Merdeka, De Preangerbode (31/08/1919)*
- Soebagijo IN, Sudiro, *Pejuang Tanpa Henti*, Jakarta, Gunung Agung, 1981.
- Soeharto & Ramadhan KH, *Soeharto: Pikiran Ucapan dan Tindakan Saya*, Jakarta, Citra Lamtorogung, 1991.
- Sudaryanto, *Daftar Kosakata Bahasa Jawa dalam Bahasa Indonesia*, Yogyakarta, Samudra Biru, 2017.
- Sudono Jusuf, *Sedjarah Perkembangan Angkatan Laut*, Jakarta, Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sedjarah ABRI, 1971.
- Sukarno & Cindy Adams, *Bung Karno Penjambung Lidah Rakjat*, Jakarta, Gunung Agung, 1966.
- Surat Wadyono kepada Anton Lucas tanggal 22 September 1977 (Arsip Koleksi Anton Lucas).
- Surat Wadyono kepada Anton Lucas tanggal 29 Mei 1992 (Arsip Koleksi Anton Lucas).
- Undang-undang Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang- Undang Buku Sati bagian Kedua*, Jakarta, Departemen Kehakiman, 1972.
- Vrees Voor de SI Bij de Koninklijke Marine, Het Vrije Woord (17/03/1917)*.
- Zeven Provincien VIII, Oetoesan Indonesia, 21 November 1933*.

**Wawancara**

Wawancara Dharmono Konstituanto Yoga bin Kr. Lawi Soemodihardjo, Pekalongan, 20 Januari 2023.

Wawancara Dharmono Konstituanto Yoga bin Kr. Lawi Soemodihardjo, Jakarta, 3 Januari 2023.

Wawancara Dharmono Konstituanto Yoga bin Kr. Lawi Soemodihardjo, Bandung, 28 Januari 2023.

Wawancara Dharmono Konstituanto Yoga bin Lawi Soemodihardjo, Pekalongan 20 Mei 2023.

Wawancara Dharmono Konstituanto Yoga bin Kr. Lawi Soemodihardjo, Pekalongan 20 Januari 2023.